

ANALISIS PENGARUH TINGKAT AKSES INTERNET, KOMPETISI POLITIK, OPINI AUDIT, KARAKTERISTIK PEMDA, DAN KARAKTERISTIK DEMOGRAFI TERHADAP PENGUNGKAPAN INFORMASI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN WEBSITE PEMERINTAH DAERAH

This research inspect about factors that influence financial and non-financial information disclosure on Local Government websites. The factors are the level of internet access, political competition, audit opinion, local government characteristics (Local Governments' age, Local government financial strength, level of independence, type of local government and size of local government), and demographic characteristics (unemployment rate and level of welfare). This research was carried out in the period of March-April 2015. Result of the study found that the level of information disclosure on local government website is relatively low. The factors that influence the level of financial disclosure are level of internet access, audit opinion, type of local government, size of local government and level of welfare. The factors that influence non-financial disclosure are level of internet access, local governments' age, size of local government, unemployment rate, and level of welfare.

Key words:

Financial and Performance information, Non-Financial Information, Local Government, Local Governments' website, Disclosure.

1. Pendahuluan

Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dengan asas otonomi dan tugas pembantuan (UUD 1945). Pemerintah daerah merupakan *agent* dalam melaksanakan pemerintahan dengan *stakeholder* utamanya adalah masyarakat sehingga informasi mengenai pelaksanaan pemerintah daerah harus tersedia bagi masyarakat. Masyarakat ingin mengetahui bagaimana pemerintah daerah mengelola daerahnya. Informasi pengelolaan daerah digunakan masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah daerah dan merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat serta pihak ketiga yang memberikan pembiayaan. Kewajiban pelaporan ini dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat pelaksanaan tugas pemerintah, termasuk penyampaian informasi publik dapat dilakukan dengan lebih mudah. Salah satu media yang mudah dan efisien digunakan adalah melalui website resmi pemerintah daerah. Melalui Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2003, Indonesia mulai mengembangkan pelaksanaan pemerintahan berbasis internet atau yang biasa dikenal dengan *e-government*. Salah satu tujuan pengembangan *e-government* adalah untuk pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh Indonesia (Inpres No 3 tahun 2003). Tahapan awal tindak lanjut inpres tersebut adalah pembentukan website resmi seluruh instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah. Pelaksanaan *e-government* di pemerintah daerah kemudian diatur melalui *blueprint e-government* untuk pemerintah daerah yang dikeluarkan Kementerian Telekomunikasi dan Informatika. Di Indonesia, pengungkapan informasi pada website resmi Pemda masih bersifat sukarela (*voluntary*). Akibatnya tingkat pengungkapan informasi masih beragam di setiap website Pemda. Motivasi untuk secara sukarela melaporkan informasi pemerintahan pada website bergantung kepada urgensi masing-masing pemda.

Laswad (2005) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah. Penelitian dilakukan pada pemerintah daerah di New Zealand, dan ditemukan bahwa *leverage*, kekayaan daerah, *press visibility*, dan *type of council* berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan pada pemda di New Zealand. Garcia & Garcia (2010) menemukan bahwa *size*, *capital investment*, *political competition*, dan *press visibility* memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah. Garcia-Sanchez et al. (2013) menemukan bahwa jumlah penduduk memiliki korelasi positif dan ideologi Pemda memiliki korelasi negatif terhadap pengungkapan informasi kegiatan sosial dan lingkungan.

Di Indonesia, penelitian mengenai pengungkapan sukarela pada website resmi dilakukan oleh Puspita (2010). Penelitian ini menemukan bahwa PAD, DAK, DAU, dan ukuran Pemda mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela pada

website resmi Pemda. Martani et al. (2013) menemukan bahwa tingkat pendidikan, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan signifikan pada website resmi Pemda.

Penelitian ini bertujuan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi dari aspek keuangan dan non keuangan pada website resmi Pemda. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini memasukkan pengaruh akses internet, usia pemda dan kompetisi politik sebagai faktor yang mempengaruhi pengungkapan di internet. Dalam penelitian ini juga akan diuji kembali faktor-faktor yang telah diteliti sebelumnya namun belum ditemukan pengaruh yang signifikan. Penelitian ini menggunakan data yang lebih baru tahun 2015, pada saat penggunaan komunikasi data semakin pesat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat akses internet tiap daerah mempengaruhi pengungkapan informasi daerah dalam website. Daerah yang memiliki tingkat akses internet tinggi terbukti memiliki pengungkapan internet yang lebih tinggi. Umur Pemda terbukti memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan informasi non keuangan. Namun penelitian ini belum berhasil menemukan pengaruh kompetisi politik.

Paper ini terbagi dalam empat bagian. Bagian pertama pendahuluan yang menjelaskan tujuan penelitian. Bagian kedua menjelaskan tentang literatur dan pengembangan hipotesis. Bagian ketiga berisikan metodologi penelitian yang membahas model, pengukuran variabel dan metode analisis. Bagian keempat membahas tentang hasil dan implikasi penelitian. Bagian kelima berisikan kesimpulan dan saran.

2. Literatur dan Pengembangan Hipotesis

2.1. *Agency Theory* dalam Pemerintahan

Agency theory menggambarkan hubungan antara dua pihak, dimana satu pihak bertindak sebagai *agent* yang beraktivitas atas kepentingan pihak lainnya sebagai *principal* (Jensen and Meckling, 1976). Teori agensi ini menitikberatkan kepada hal dimana masing-masing pihak bertingkah laku untuk memaksimalkan keuntungan masing-masing (*self-interest*), sehingga hal ini akan mengakibatkan munculnya *agency problem*, dimana agent sebagai perpanjangan tangan dari

principal tidak bertindak sesuai dengan kepentingan principal namun cenderung untuk kepentingan pribadinya.

Jika dikaitkan kedalam bidang pemerintahan, pemerintah dapat dikategorikan sebagai *agent* sedangkan masyarakat sebagai *principal*. Sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa pemerintahan Indonesia dibentuk untuk memajukan kesejahteraan umum, maka pelaksanaan pemerintahan harus didasarkan kepada tujuan tersebut. Namun seringkali pelaksanaan pemerintah hanya berfokus kepada kepentingan aparat pemerintah itu sendiri sehingga tujuan pelaksanaan pemerintahan tidak tercapai.

Mengatasi *agency problem* yang terjadi baik pada lingkungan swasta maupun pemerintah, Jesen dan Mecklin (1976) menjelaskan adanya upaya *principal* untuk mengontrol tindakan manajemen agar bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* yaitu dengan *monitoring*. Tindakan ini nantinya akan menimbulkan *monitoring cost* bagi *principal*. Pada perusahaan *monitoring cost* dapat berupa biaya audit, *budget restriction*, dsb. Sedangkan dari segi pemerintahan tindakan *monitoring* atas aktivitas pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, maupun instansi pemerintah lainnya, telah diatur dalam undang-undang untuk memastikan hak masyarakat sebagai *principal* terpenuhi. Meskipun *monitoring cost* pada awalnya ditanggung oleh *principal*, namun biaya ini seringkali dikembalikan kepada *agent* sehingga agen lah yang menanggungnya dengan dihubungkan kepada kekayaan agen seperti kebijakan remunerasi. Dalam pemerintahan tindakan *monitoring* yang diwujudkan melalui peraturan perundangan menimbulkan biaya bagi agen (pemerintah) yaitu berupa diberhentikan, hukuman pidana, dan hukuman lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang.

Monitoring cost yang seringkali dibebankan kepada agen menjadikan agen cenderung akan bertindak untuk meminimalisir biaya ini. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyampaikan laporan atas operasional yang telah dilakukan kepada *principal*. Pengungkapan informasi yang lebih besar dan rutin akan meminimalisir *monitoring cost* lebih besar, sehingga biaya yang ditanggung akan lebih sedikit. Salah satu bentuk pengungkapan yang sering dilakukan, baik pada sektor publik maupun swasta, adalah melalui website resmi instansi tersebut.

Pengungkapan pada website ini merupakan salah satu cara yang efisien dalam mengatasi *agency problem*.

2.2. *Legitimacy Theory* dalam Pemerintahan

Teori legitimasi seringkali digunakan untuk menjelaskan aktivitas perusahaan dalam pengungkapan informasi sukarela kepada para stakeholdernya, umumnya informasi sosial dan lingkungan. Menurut Suchman (1995):

“Legitimacy is generalized perception or assumption that the action of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definition”(Suchman, 1995, p. 574)

Dikaitkan kedalam bidang pemerintah, legitimasi merupakan suatu kondisi dimana tingkah laku pemerintah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga akan tercipta kepercayaan atas kebijakan dan keputusan pemerintah. Adanya perbedaan antara aktivitas pemerintah dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat akan menimbulkan adanya *legitimacy gap* yang mengancam kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Haniffa & Cooke, 2005). Disisi lain, norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tidaklah bersifat konstan, ada perubahan nilai-nilai yang dianut, sehingga entitas harus dapat menyesuaikan dengan persepsi baru yang dianut masyarakat (Tilling & Tilt, 2010).

Legitimasi suatu entitas bergantung pada ekspektasi masyarakat mengenai kinerja entitas yang bersangkutan. Dalam menjaga legitimasi tersebut, hal yang paling krusial adalah komunikasi dengan masyarakat karena dengan begitu masyarakat diperlihatkan atas aktivitas dan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah (Lindblom, 1994). Terdapat empat strategi komunikasi yang dapat dilakukan dalam menjaga legitimasi entitas (Lindblom, 1994), yaitu:

- 1) Berusaha untuk mendidik dan memberitahu masyarakat tentang perubahan dalam kinerja dan aktivitas entitas. Pemberitahuan atas perubahan yang terjadi dalam entitas dapat mengurangi *legitimacy gap* atas aktivitas yang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat
- 2) Mencoba mengubah persepsi masyarakat atas entitas yang bersangkutan
- 3) Memanipulasi persepsi dengan mengalihkan perhatian publik terhadap isu baru.

4) Mengubah ekspektasi eksternal mengenai kinerja entitas.

Salah satu bentuk komunikasi yang dapat dilakukan oleh entitas pemerintah dalam menjaga dan memperkuat legitimasinya terhadap publik adalah dengan penyampaian informasi kinerjanya secara berkala. Pemerintah diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan aktivitasnya diantaranya laporan keuangan (LK), laporan kinerja (LAKIP), dan laporan pelaksanaan pemerintah daerah (LPPD) bagi pemerintah daerah. Website resmi instansi pemerintah dapat digunakan sebagai media yang efisien dalam memberikan sinyal baik atas kinerja pemerintah sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

2.3. Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengungkapan Pemerintah Daerah

Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan sangat diperhatikan. Selain karena diamanatkan dalam Undang-Undang mengenai tugasnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagian besar pelaksanaan pemerintahan didanai oleh rakyat yaitu melalui pajak. Selain pajak, pembiayaan lainnya berasal dari pihak ketiga yang tentunya akan meminta pertanggungjawaban mengenai penggunaan dana dan pelaksanaan aktivitas pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan dengan jelas bahwa setiap kepala instansi pemerintah wajib menyusun dan melaporkan laporan keuangan (LK) atas instansi yang dipimpinnya yang nantinya akan diperiksa oleh BPK. Lebih lanjut lagi Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Bagi Pemda, secara khusus diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat sesuai dengan PP No 3 Tahun 2007, sehingga secara total Pemda wajib menyusun LKPD, LAKIP, dan LPPD.

Sementara itu pemerintah merupakan pihak yang melakukan pelayanan publik bagi masyarakat. Pemerintah daerah khususnya diberikan wewenang untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Urusan pemerintahan yang dilakukan pejabat pemerintah merupakan bentuk pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat (PP No 38 tahun 2007). Masyarakat sebagai pihak yang “dilayani” oleh pemerintah hendaknya mengetahui hak-hak yang dapat diperoleh serta pelayanan

apa yang dapat diterima dari pemerintah daerah. Informasi pelayanan dasar yang dilakukan pemerintah daerah seharusnya diketahui oleh masyarakat karena merupakan hak warga Indonesia. PP No 38 Tahun 2007 merupakan dasar hukum pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Sejalan dengan wewenang yang diberikan, informasi mengenai pelayanan yang dilakukan serta pelaksanaan aktivitas dari wewenang yang diperoleh harus dipertanggungjawabkan. Karena luasnya cakupan *principal* yang harus diberikan informasi pertanggungjawaban, maka instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang terbuka bagi seluruh masyarakat.

Namun seringkali pelaporan tersebut dilakukan hanya untuk memenuhi kewajiban perundang-undangan. Pengungkapan laporan tersebut terhadap masyarakat seringkali dibatasi, padahal laporan tersebut mencerminkan pelaksanaan pemerintahan yang telah dilakukan. Masyarakat sebagai *stakeholder* terbesar pemerintah memiliki hak untuk mendapatkan informasi ini. Peraturan perundang-undangan menjamin hak masyarakat ini, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa informasi LPPD harus disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik.

Informasi yang diungkapkan kepada masyarakat umumnya hanya sebatas yang ditetapkan dalam undang-undang. Pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary*) masing terbilang langka. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa hak untuk mendapatkan informasi publik adalah hak asasi warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang. Undang-undang ini menganjurkan bahwa informasi-informasi lainnya yang wajar diketahui oleh publik sebaiknya diungkapkan. Karena sifatnya yang tidak wajib, maka didasarkan atas inisiatif masing-masing instansi pemerintah sehingga jumlah pengungkapan sukarela menunjukkan tingkat transparansi yang lebih tinggi.

2.4. E-Government di Indonesia

Perkembangan *e-government* di Indonesia diawali dengan Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Dalam Inpres ini disebutkan bahwa tujuan pengembangan *e-Government* adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. *E-Government* ini diharapkan dapat membantu kegiatan pemerintahan dengan proses kerja elektronik dan informasi dan pelayanan publik dapat diakses masyarakat dengan lebih mudah dan murah.

Inpres ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kominfo Nomor 26 tahun 2006 tentang penggunaan domain *go.id* bagi website resmi pemerintah. Selanjutnya Kemenkominfo mengeluarkan *blueprint e-Government Indonesia* dan pedoman implementasi penggunaan website resmi bagi pemerintah daerah. Dalam *Blueprint e-Government Indonesia* yang dikeluarkan oleh Kemenkominfo dijelaskan bahwa ada 4 tahapan perencanaan implementasi *e-Government* di Indonesia, yaitu:

1. Tingkat 1 yaitu Persiapan yang meliputi pembuatan website di setiap lembaga pemerintahan, penyiapan SDM, dan akses terhadap internet
2. Tingkat 2 yaitu Pematangan yang meliputi pembuatan website yang interaktif dan terhubung dengan lembaga lain
3. Tingkat 3 yaitu Pemantapan yang meliputi pembentukan website transaksi pelayanan publik dan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain
4. Tingkat 4 yaitu Pemanfaatan yang meliputi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), dan Government to Citizen (G2C).

Jika dilihat dengan kenyataan yang ada di Indonesia, setelah lebih dari 10 tahun instruksi presiden mengenai pelaksanaan *e-Government* di Indonesia, sebagian besar implementasinya baru hingga tingkat 1 atau persiapan. Hingga saat ini masih banyak instansi pemerintah yang belum memiliki website resmi atau website resmi tidak dapat diakses oleh publik, khususnya pemerintah daerah. Dari 539 daerah otonom dan 6 daerah administrative di Indonesia, jumlah domain Pemda yang terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri adalah sebanyak 518 website (Kementerian Dalam Negeri). Namun dari jumlah tersebut tidak semua yang aktif dan dapat diakses. Penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai

website resmi Pemda juga menemukan kendala dalam hal akses terhadap website resmi ini. Puspita dan Martani (2012) menemukan 168 website Pemda yang dapat diakses, Medina (2012) melakukan pengamatan di akhir tahun 2010 dan menemukan 257 website Pemda tingkat dua, sedangkan Hermana et al (2012) berhasil mengakses 424 website Pemda. Meskipun belum secara keseluruhan namun jumlah ini memiliki trend meningkat.

Dikaitkan dengan tujuannya untuk mempermudah pelayanan publik, konten informasi yang disampaikan pada website masih cenderung minim. Pengungkapan melalui website bagi Pemda diatur oleh Panduan Pengembangan Website Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dalam pedoman ini diatur standar minimal pengungkapan di website resmi. Informasi lainnya bersifat sukarela (voluntary). Dalam prakteknya, Pemda cenderung untuk mengungkapkan informasi sebatas syarat minimal yang ditetapkan oleh Kemenkominfo. Dalam Panduan Pengembangan Website Pemda (2010) disebutkan konten minimum yang harus dilaporkan adalah:

1. Selayang Pandang, berisi informasi singkat mengenai Pemda (visi, misi, logo, moto, daerah, dsb)
2. Pemerintah Daerah, berisi informasi mengenai struktur organisasi Pemda setempat
3. Geografi, menjelaskan keadaan topografi, demografi, cuaca, iklim, dan budaya daerah yang bersangkutan
4. Peta Wilayah dan Sumberdaya, berisi batas wilayah administrasi dalam bentuk peta wilayah dan sumber daya yang dimiliki dalam bentuk peta sumberdaya
5. Peraturan/kebijakan daerah, berisi Perda yang dikeluarkan daerah setempat
6. Berita
7. Forum diskusi
8. Saran/Komentar pengunjung pada buku tamu

Jika dilihat, informasi yang wajib disampaikan masih sebatas informasi umum daerah. Meskipun dalam panduan yang diterbitkan oleh Kominfo hanya menyebutkan 8 informasi yang wajib ditampilkan dalam website resmi Pemda, perintah untuk pengungkapan informasi pemerintahan pada website Pemda diatur

melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Beberapa diantaranya adalah:

1. Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah, yang mewajibkan pelaporan informasi keuangan daerah melalui website resmi Pemda.
2. Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat, yang menyatakan bahwa informasi terkait LPPD wajib disampaikan kepada masyarakat baik melalui media cetak atau elektronik
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7A tahun 2007 tentang tatacara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dari masyarakat atas laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, mewajibkan pelaporan informasi melalui media cetak/elektronik kepada masyarakat.
4. Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang-undang ini menetapkan beberapa jenis informasi yang wajib disediakan secara berkala dan serta merta bagi publik yang disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait tingkat pengungkapan informasi pada website resmi Pemda diawali oleh penelitian Laswad et al. (2005) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan pada website Pemda di New Zealand. Faktor-faktor yang diuji adalah ukuran pemda, *leverage*, kekayaan daerah, kompetisi politik, *press visibility*, dan jenis Pemda. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan pada website Pemda adalah *leverage*, kekayaan daerah, *press visibility*, dan jenis Pemda.

Garcia dan Garcia (2010) melanjutkan penelitian Laswad et al. (2005) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi keuangan pada website resmi Pemda di Spanyol. Faktor-faktor yang diuji adalah

ukuran pemda, *leverage*, *capital investment*, kompetisi politik, dan *press visibility*. Penelitian Garcia mengembangkan alat ukur pengungkapan sukarela dan menguji kembali faktor-faktor yang sebelumnya tidak ditemukan hubungan signifikan. Hasil penelitian Garcia menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela adalah ukuran pemda, *capital investment*, *press visibility*, dan kompetisi politik.

Garcia-Sanchez et al. (2013) melakukan penelitian terhadap pengungkapan informasi non keuangan pada website Pemda khususnya informasi *sustainability* oleh pemerintah daerah Spanyol, karena masih sedikitnya penelitian yang membahas informasi non keuangan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa yang mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi non keuangan pada website resmi Pemda adalah ukuran Pemda yang diproyeksikan dengan jumlah populasi daerah dan ideology konservatif pada Pemda setempat.

Di Indonesia penelitian terkait tingkat pengungkapan sukarela pada website Pemda dilakukan oleh Sari (2010) yang mengaplikasikan penelitian Laswad et al. di Indonesia, namun variabel dependen yang diteliti tidak hanya informasi yang diungkapkan namun juga kualitas dan penyajian pada website. Faktor-faktor yang diuji adalah kinerja Pemda yaitu DAU, DAK, dan PAD, serta karakteristik Pemda yaitu ukuran daerah, kompleksitas daerah, belanja Pemda, dan jenis Pemda. Penelitian ini menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi pada website adalah DAU, DAK, PAD dan ukuran daerah.

Penelitian selanjutnya oleh Martani et al. (2013) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan, non keuangan, dan kualitas website. Faktor-faktor yang digunakan untuk menilai masing-masing informasi berbeda. Dari hasil penelitian diperoleh faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi keuangan adalah ukuran Pemda, tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi non-keuangan adalah tingkat pendidikan, ukuran Pemda, dan kemampuan keuangan Pemda.

Dari penelitian-penelitian tersebut, penulis mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel baru dan menguji kembali variabel yang belum

ditemukan hubungan yang signifikan. Selain itu penulis juga mengembangkan jumlah sampel penelitian yang terbatas sebelumnya sehingga hasil penelitian yang diperoleh lebih akurat.

2.6. Pengembangan Hipotesis

2.6.1. Tingkat Akses Internet

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia menjadikan pertukaran informasi yang lebih mudah dan murah. Di Indonesia perkembangan internet sangat pesat terutama dalam waktu 5 tahun terakhir. Murahnya harga untuk mengakses internet dan beragamnya pilihan alat untuk mengakses internet menjadikan tingkat akses internet semakin lama semakin meningkat. Akan tetapi tingkat akses internet di Indonesia beragam dan hal ini dipengaruhi oleh kondisi masyarakat setempat. Kondisi demografi daerah seperti tingkat pendidikan, kesejahteraan, dan kecepatan akses internet akan mempengaruhi besarnya jumlah masyarakat yang mengakses internet. Berdasarkan hasil riset Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), pertumbuhan pengguna internet pada tahun 2014 di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 34,9% dari tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan untuk setiap daerah, namun tren pengguna selalu naik.

Penelitian dengan menggunakan variabel tingkat akses internet terhadap pengungkapan informasi pada website pemda belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini peneliti memasukkan variabel ini mengingat masih bervariasinya tingkat kemampuan akses internet di Indonesia dan perbedaan jumlah akses internet disetiap daerah di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Akses internet merupakan salah satu media untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan. Daerah yang memiliki penduduk yang mengakses internet lebih besar tentunya akan memiliki tekanan yang lebih besar untuk mengungkapkan informasi pemerintahan pada website karena pengawasan publik dapat dilakukan dengan lebih mudah. Dari pemikiran tersebut penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Tingkat Aksesibilitas internet berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan pada website Pemda

H2 : Tingkat aksesibilitas internet berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi non-keuangan pada website Pemda

2.6.2. Kompetisi Politik

Kompetisi politik ditunjukkan dengan besarnya persaingan untuk menduduki jabatan kepala daerah. Semakin banyak jumlah saingan dalam pemilihan kepala daerah, maka semakin besar persaingan politik. Persaingan politik yang tinggi menjadi salah satu bentuk pengawasan kepada pemerintah terpilih. Pemda yang memiliki kompetisi politik yang tinggi memiliki insentif untuk melaporkan informasi pelaksanaan pemerintah lebih besar karena adanya pengawasan dari lawan politik ini, salah satunya melalui media internet.

Laswad et al. (2005), Garcia and Garcia (2010), dan Garcia-Sanchez et al. (2013) telah melakukan penelitian terkait dengan variabel kompetisi politik. Penelitian Laswad tidak ditemukan hubungan yang signifikan, namun dalam penelitian Garcia dan Garcia (2010) dan Garcia-Sanchez et al. (2013) ditemukan hubungan positif yang signifikan. Di Indonesia penelitian oleh Trisnawati dan Achmad (2014) menemukan pengaruh positif antara kompetisi politik dengan pengungkapan informasi keuangan pada website Pemda. Namun, penelitian Sinaga dan Prabowo (2011) dan Afryansyah dan Haryanto (2013) tidak ditemukan pengaruh yang signifikan.

Kompetisi politik yang besar akan menghasilkan pengawasan yang semakin besar pula dan Pemda (khususnya kepala daerah) sebagai pihak yang diawasi akan menanggung *monitoring cost* yang besar pula. Pengungkapan informasi pada website merupakan salah satu media yang ekonomis dan efisien untuk mengimbangi pengawasan yang dilakukan. Dari penjelasan diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Kompetisi Politik berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan pada website Pemda

H4 : Kompetisi Politik berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi non-keuangan pada website Pemda

2.6.3. Opini Audit BPK RI

Opini audit diberikan yang diberikan oleh BPK menunjukkan tingkat kewajaran pada LKPD. Opini audit ditentukan dari jumlah temuan audit yang diperoleh pada saat pelaksanaan audit oleh BPK. Opini audit juga didasarkan kepada pengungkapan informasi yang dilakukan Pemda dalam LKPD nya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait pelaporan keuangan daerah.

Liestiani (2008) melakukan penelitian terhadap tingkat pengungkapan pada LKPD pemda dengan memasukkan salah satu faktor jumlah temuan audit pada LKPD dan diperoleh hubungan positif terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan pada LKPD karena semakin banyak jumlah temuan yang diperoleh BPK, maka akan semakin besar jumlah informasi yang akan diminta BPK dalam laporan keuangannya. Sedangkan penelitian Hilmi dan Martani (2010) serta Khasanah dan Rahardjo (2014) tidak ditemukan pengaruh signifikan antara jumlah temuan audit dengan tingkat penungkapan informasi keuangan pada LKPD. Penelitian Trisnawati dan Achmad (2014) juga tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara opini audit dengan pengungkapan informasi keuangan pada website resmi Pemda.

Dari penelitian-penelitian yang telah dijabarkan diatas serta telaah literatur yang penulis lakukan, penulis menurunkan kerangka berpikir bahwa jumlah temuan yang sedikit akan menghasilkan opini audit yang bagus, yang menunjukkan pelaporan dan pelaksanaan keuangan yang baik dan benar sehingga Pemda cenderung tidak akan menutup-nutupi informasi pelaksanaan pemerintahnya yang baik tersebut. Pengungkapan informasi terkait pelaksanaan pemerintahan yang bagus tersebut akan memberikan sinyal positif bagi masyarakat, sehingga Pemda yang memiliki opini audit yang baik cenderung melakukan pengungkapan yang lebih banyak. Dari penjabaran tersebut diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Opini audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan pada website Pemda

H6 : Opini audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi non-keuangan pada website Pemda

2.6.4.Karakteristik Pemerintah Daerah

Karakteristik Pemda merujuk kepada sifat atau ciri-ciri yang dimiliki oleh Pemda yang bersangkutan. Karakteristik dapat menunjukkan sifat yang melekat pada suatu objek, dalam hal ini adalah Pemda. Dalam penelitian ini karakteristik Pemda yang dimaksud adalah ciri-ciri yang melekat kepada instansi Pemda itu sendiri yaitu usia Pemda, kemampuan keuangan daerah, kemandirian Pemda, jenis daerah dan ukuran Pemda.

2.6.5. Usia Pemda

Usia Pemda menunjukkan berapa lama Pemda tersebut telah berdiri. Di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini telah dilakukan beberapa kali pemekaran daerah, terutama sejak dimulainya era Reformasi pada tahun 1999. Suatu Pemda yang telah berdiri lebih lama akan memiliki kemampuan pengelolaan dan infrastruktur yang lebih baik dan lengkap, serta pengalaman yang lebih banyak sehingga tingkat pengungkapan yang dilakukan juga lebih banyak.

Penelitian oleh Setyaningrum dan Syafitri (2012) menemukan hubungan positif yang signifikan antara umur administratif Pemda dengan tingkat pengungkapan informasi pada laporan keuangan Pemda. Sedangkan pada penelitian Khasanah dan Rahardjo (2014) tidak ditemukan hubungan yang signifikan.

Penelitian terkait hubungan umur Pemda dan pengungkapan informasi pada website resmi Pemda belum pernah dilakukan di Indonesia. Namun jika ditelaah lebih lanjut maka Pemda yang telah lebih lama berdiri akan memiliki kemampuan dalam pengelolaan infrastruktur internet dan kemampuan keuangan yang lebih stabil untuk mengembangkan pemanfaatan internet. Selain itu Pemda yang lebih lama berdiri telah melakukan kegiatan pemerintahan yang lebih banyak sehingga informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan yang harus disampaikan lebih banyak. Hal ini akan mempengaruhi jumlah informasi yang diungkapkan pada website Pemda. Dari penjelasan tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H7 : Usia Pemda berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan pada website Pemda

H8 : Usia Pemda berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi non-keuangan pada website Pemda

2.6.6. Kemampuan Keuangan Daerah

Pengembangan suatu sistem dalam sektor publik sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya pada instansi yang bersangkutan, khususnya kemampuan keuangan. Pengembangan *e-Government* pada Pemda masih terbilang hal yang baru dan aplikasinya pada masing-masing daerah bervariasi sesuai dengan kemampuan keuangannya. Daerah yang memiliki kondisi keuangan yang lebih baik dapat mengeluarkan belanja bagian teknologi informasi sehingga dapat memberikan informasi melalui website lebih baik. Hal ini akan mempengaruhi jumlah pengungkapan informasi publik yang disampaikan pada website resmi Pemda.

Penelitian sebelumnya oleh Alt et al (2006) menemukan bahwa kemampuan keuangan daerah meningkatkan insentif bagi politisi untuk meningkatkan tingkat transparansi. Guillamon et al (2001) dalam penelitiannya di Spanyol menemukan bahwa pemerintah daerah yang memiliki tingkat transparansi yang tinggi memperoleh dana yang lebih tinggi dari pemerintah pusat. Martani et al. (2013) juga menemukan bahwa kemampuan keuangan daerah berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan informasi non keuangan pada website resmi Pemda. Garcia-Sanchez et al. (2013) melakukan penelitian yang sama terkait hubungannya dengan pengungkapan informasi non-keuangan pada website Pemda di Spanyol, namun tidak ditemukan hasil yang signifikan. Sementara itu terkait dengan hubungan kemampuan keuangan daerah dengan pengungkapan informasi keuangan belum pernah diteliti sebelumnya.

Pembiayaan pelaksanaan pemerintahan daerah harus mengikuti anggaran yang telah disusun sebelumnya, maka dari itu pengembangan suatu inovasi dalam Pemda bergantung pada dana yang tersedia setelah dikurangi dengan belanja wajib yang telah dianggarkan sebelumnya. Kemampuan keuangan pemda akan mempengaruhi pengembangan inovasi yang dilakukan. Pemda yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi dapat mengembangkan sistem informasi yang lebih bagus sehingga informasi yang diungkapkan pada website lebih banyak. Dari

penjelasan diatas dan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H9 : Kemampuan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan pada website Pemda.

H10 : Kemampuan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan pada website Pemda

2.6.7. Tingkat Kemandirian Daerah

Sebagian besar pelaksanaan pemerintah daerah di Indonesia berasal dari transfer dana alokasi umum pemerintah pusat. Akan tetapi masing-masing daerah memiliki potensinya tersendiri yang dapat digali dan menjadi penghasilan bagi daerahnya. Suatu daerah yang memiliki kinerja yang bagus akan dapat menggali potensi daerahnya secara maksimal sehingga nilai pendapatan asli daerah (PAD) menjadi lebih besar. Undang-undang No 3 tahun 2007 juga menyebutkan bahwa PAD merupakan salah satu indikator kinerja Pemda.

Sari (2010) melakukan penelitian yang melihat hubungan antara tingkat PAD dengan tingkat pengungkapan informasi pada website Pemda dan ditemukan hubungan positif yang signifikan. Penelitian Puspita (2010) menggunakan indeks skoring yang melihat website pemda secara keseluruhan, tidak terbatas pada informasi saja.

Pada penelitian ini penulis menggunakan variabel tingkat kemandirian ini untuk melihat hubungannya dengan pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan. Perbedaan dengan penelitian Puspita (2010) adalah indeks skoring yang digunakan berbeda, dimana dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada informasi yang disampaikan, terlepas dari bentuk desain dan kualitas website.

H11 : Tingkat kemandirian Pemda berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan pada website Pemda

H12 : Tingkat kemandirian Pemda berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan pada website Pemda

2.6.8. Jenis Daerah

Daerah otonom di Indonesia dibedakan menjadi Daerah otonom tingkat I, yaitu Pemerintah Provinsi, dan Daerah otonom tingkat II, yaitu Kabupaten dan Kota. Kabupaten dan Kota memiliki perbedaan secara geografis dan demografis. Daerah kabupaten umumnya terdiri dari daerah pedesaan dengan luas yang lebih besar daripada kota. Kepadatan penduduknya lebih kecil dan penduduknya umumnya bermatapencarian dibidang pertanian. Sementara itu daerah kota terdiri dari daerah metropolitan dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi dan umumnya bekerja dibidang perdagangan dan jasa.

Penelitian-penelitian sebelumnya terkait pengungkapan informasi pada website resmi Pemda, seperti Laswad et al.(2005) memasukkan faktor jenis daerah kedalam penelitiannya dan berhasil membuktikan hipotesisnya bahwa daerah kota memiliki tingkat pengungkapan informasi keuangan pada website yang lebih tinggi daripada kabupaten. Di Indonesia penelitian Medina (2012) melakukan penelitian tingkat pengungkapan informasi keuangan pada website resmi Pemda dan menemukan hasil yang signifikan. Namun penelitian Sari dan Martani (2010) dan Martani et al. (2014) tidak diperoleh hubungan yang signifikan.

Perbedaan karakteristik Kabupaten dan Kota diprediksi akan memberikan tingkat pengungkapan yang berbeda pada website Pemda. Daerah kota yang memiliki tingkat sosial, ekonomi, dan pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah kabupaten. Terkait dengan penggunaan internet, penduduk kota cenderung menggunakan dan mengakses dalam jumlah yang lebih besar, sehingga Pemda berbentuk Kota akan mengungkapkan informasi yang lebih besar pada website daripada Pemda berbentuk Kabupaten. Dari penjelasan dan penelitian terdahulu diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H13 : Pemda Kota akan memiliki tingkat pengungkapan informasi keuangan pada website Pemda lebih tinggi daripada Pemda Kabupaten

H14 : Pemda Kota akan memiliki tingkat pengungkapan informasi non-keuangan pada website Pemda lebih tinggi dariada Pemda Kabupaten

2.6.9. Ukuran Daerah

Populasi suatu daerah menentukan seberapa banyak pelayanan publik yang dilakukan Pemda dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah maka semakin besar tanggungjawab dan pelayanan yang dilakukan pemda untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.

Garcia dan Garcia (2010) dan Martani et al. (2013) menggunakan total populasi sebagai proksi ukuran daerah dan menemukan hubungan positif yang signifikan antara ukuran daerah dengan tingkat pengungkapan informasi keuangan pada website Pemda. Penelitian Garcia-Sanchez et al. (2013) juga menemukan hubungan yang positif yang signifikan antara ukuran daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan pada website pemda.

Daerah yang memiliki jumlah penduduk yang besar akan mengalami pengawasan publik yang lebih besar serta *stakeholder* yang lebih beragam. Para pemangku kepentingan yang beragam ini memiliki preferensi dan kebutuhan informasi yang beragam pula. Oleh karena itu besarnya tanggungjawab pelayanan yang diberikan, serta besarnya tekanan permintaan atas informasi pelaksanaan pemerintah yang diakibatkan banyaknya *stakeholder*, maka pemda yang memiliki ukuran yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak. Website resmi Pemda merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk mengungkapkan informasi pemerintahan. Dari landasan teori dan penelitian sebelumnya yang telah dijabarkan diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H15 : Ukuran daerah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan pada website Pemda

H16 : Ukuran daerah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi non-keuangan pada website Pemda

2.7. Karakteristik Demografi Daerah

Karakteristik demografi daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ciri khusus yang melekat kepada kependudukan daerah tersebut. Karakteristik demografi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran dan tingkat kesejahteraan penduduk.

2.7.4. **Tingkat Pengangguran**

Garcia-Sanchez et al. (2013) meneliti hubungan tingkat pengangguran terhadap pengungkapan informasi non keuangan pada website Pemda. Dalam penelitiannya Garcia-Sanchez dijelaskan bahwa daerah yang mengalami perkembangan ekonomi yang tinggi, cenderung juga akan mengalami ekspansi pelayanan pada sektor publik. Ekspansi jasa yang dilakukan dapat menjadikan bertambahnya stakeholder yang terangkul, sehingga pemerintah cenderung juga akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak.

Navarro et al. (2011) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat pengangguran dengan tingkat pengungkapan. Sementara itu Guillamo et al. (2011) menemukan hasil sebaliknya yaitu hubungan negatif antara tingkat pengangguran dengan tingkat pengungkapan. Sementara itu Garcia-Sanchez et al. (2013) tidak menemukan hasil yang signifikan dalam penelitiannya. Penelitian di Indonesia oleh Martani et al (2013) juga tidak ditemukan hasil yang signifikan.

Adanya ketidakkonsistensian pada hasil penelitian sebelumnya menjadikan penulis tidak menyatakan arah dalam hipotesis ini. Dari literature yang penulis temukan diperoleh hasil yang tidak konsisten. Selain itu masih sedikit penelitian terkait tingkat pengangguran, sehingga dalam penelitian ini hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H17 : Tingkat Pengangguran berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan pada website Pemda

H18 : Tingkat Pengangguran berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi non-keuangan pada website Pemda

2.7.5. **Tingkat Kesejahteraan Penduduk**

Style dan Tennyson (2007) menyatakan bahwa pendapatan perkapita yang semakin tinggi akan mengakibatkan *political monitoring* yang semakin tinggi pula oleh masyarakatnya sehingga tekanan untuk menyediakan informasi kepada publik semakin lebih besar.

Stlye and Tennyson (2007) dan Serrano et al (2008) menemukan korelasi positif antara tingkat pendapatan perkapita dengan tingkat pengungkapan informasi

pada website. Martani et al. (2013) menemukan hubungan positif yang signifikan antara tingkat kesejahteraan penduduk dengan tingkat pengungkapan informasi keuangan pada website Pemda. Penelitian yang melihat hubungan tingkat kesejahteraan penduduk dengan pengungkapan informasi non keuangan pada website pemda belum pernah dilakukan. Namun tekanan permintaan informasi yang daerah yang memiliki penduduk dengan kesejahteraan yang tinggi umumnya tidak hanya terbatas pada informasi keuangan. Informasi non keuangan, khususnya pelayanan publik yang dilakukan Pemda akan banyak diminta oleh penduduk dengan kesejahteraan tinggi sehingga tekanan untuk mengungkapkan informasi ini semakin besar.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah pendapatan perkapita daerah. Tingkat kesejahteraan yang tinggi mendorong masyarakat lebih peduli terhadap pelaksanaan pemerintahan sehingga mendorong Pemda untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih besar. Dari penjabaran tersebut diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H19 : Tingkat Kesejahteraan penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan pada website Pemda

H20 : Tingkat Kesejahteraan penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan pada website Pemda

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Kerangka Penelitian

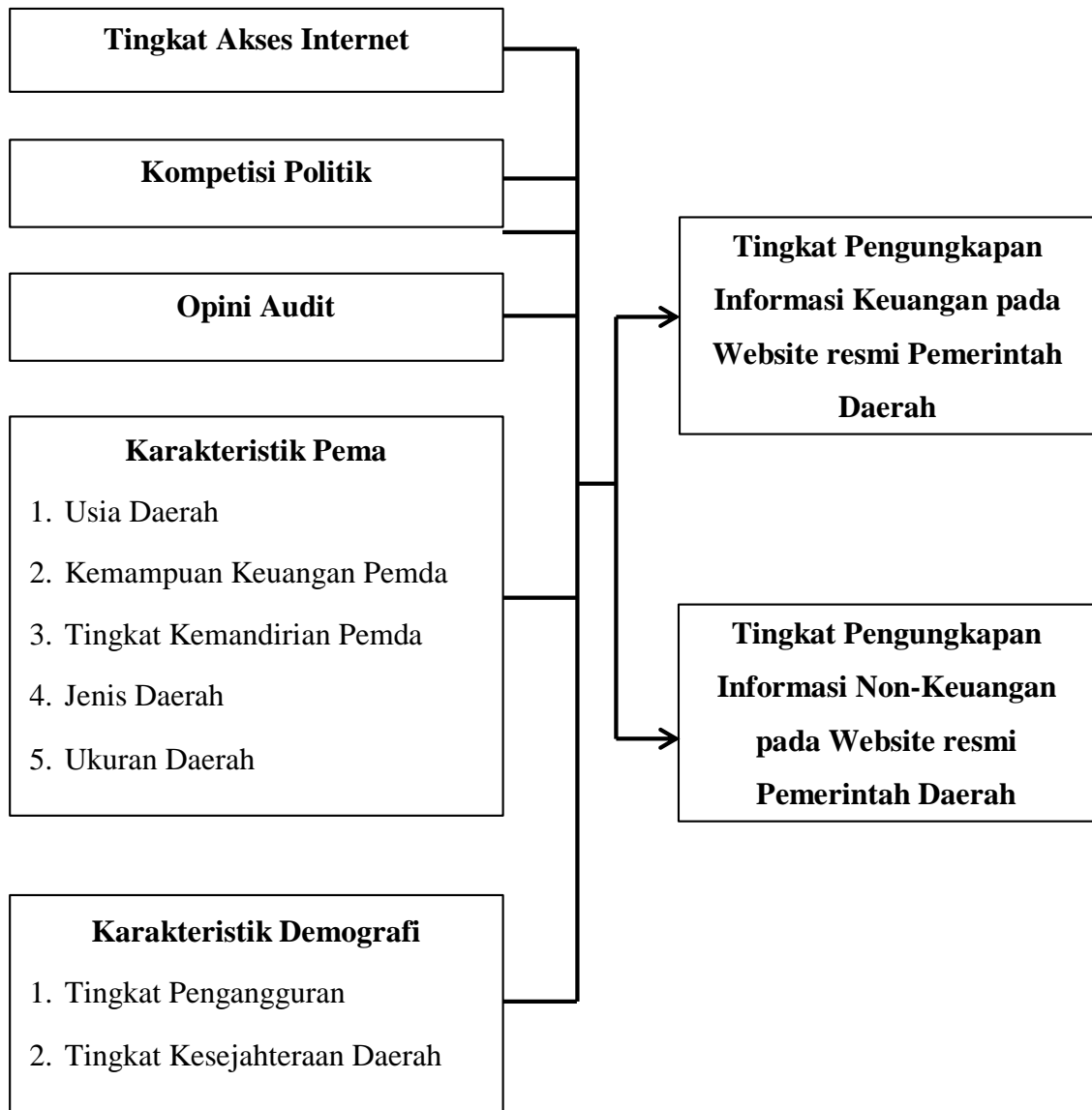
Pelaksanaan Otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2003 memberikan kekuasaan yang besar terhadap Pemerintah Daerah dalam mengurus kepentingan daerahnya. Sebagai bentuk kontrol atas kekuasaan yang diberikan, Pemerintah pusat mewajibkan Pemda menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menunjukkan tingkat akuntabilitas Pemda, dan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah (LAKIP) serta Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah (LPPD) yang menunjukkan transparansi Pemda. Informasi ini wajib disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan amanah dalam PP No 56 tahun 2005 tentang sistem keuangan daerah, PP No 3 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa informasi penyelenggaraan Pemda harus disampaikan kepada publik, serta UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, sektor publik kini mulai mengadopsi pemerintahan berbasis internet (*E-Government*) sesuai Instruksi Presiden RI No 3 tahun 2003, dimulai dengan pembentukan website resmi Pemda. Namun, konten informasi yang harus diungkapkan dalam website Pemda tidak ditentukan, sehingga pengungkapannya bersifat *voluntary*. Pengungkapan yang lebih banyak dalam website Pemda menunjukkan *willingness* yang lebih besar oleh Pemda atas pelaksanaan pemerintahan yang berarti tingkat akuntabilitas dan transparansi yang lebih tinggi.

Untuk menilai tingkat pengungkapan pada website Pemda maka dalam penelitian ini dibentuk suatu indeks pengungkapan informasi pada website oleh Pemda agar didapatkan suatu standar yang sama mengenai tingkat pengungkapan. Indeks yang dibentuk terdiri dari indeks pengungkapan informasi keuangan dan indeks pengungkapan informasi non keuangan dan beberapa faktor yang mungkin

akan mempengaruhi tingkat pengungkapannya. Kerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian Pengungkapan Informasi Keuangan



3.2. Model Penelitian

Model penelitian dalam penelitian ini merupakan hasil modifikasi dan pengembangan dari penelitian-penelitian terkait sebelumnya. Penulis menambahkan beberapa variabel independen yang belum dimasukkan dalam penelitian sebelumnya. Selain penambahan variabel baru, penulis juga menguji kembali variabel yang belum ditemukan hubungan signifikan. Model penelitian pada penelitian ini dibagi menjadi dua, model pertama menjelaskan pengungkapan informasi keuangan dan model kedua menjelaskan pengungkapan informasi non-keuangan. Namun karena keterbatasan data yang ada variabel kompetisi politik (POLCOM) dimasukkan kedalam model yang berbeda dengan jumlah sampel yang berbeda sehingga untuk masing-masing variabel dependen terdapat 2 model, yaitu yang tidak menggunakan variabel POLCOM dan yang menggunakan variabel POLCOM. Model penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut

Model 1a

$$DISC_FIN = \beta_0 + \beta_1 INTACC + \beta_2 OP + \beta_3 AGE + \beta_4 BUDCAP + \beta_5 PAD + \beta_6 SIZE + \beta_7 TYPE + \beta_8 UNEMPLOY + \beta_9 WEALTH + \varepsilon$$

Model 1b

$$DISC_FIN = \beta_0 + \beta_1 INTACC + \beta_2 POLCOM + \beta_3 OP + \beta_4 AGE + \beta_5 BUDCAP + \beta_6 PAD + \beta_7 SIZE + \beta_8 TYPE + \beta_9 UNEMPLOY + \beta_{10} WEALTH + \varepsilon$$

Model 2a

$$DISC_NONFIN = \beta_0 + \beta_1 INTACC + \beta_2 OP + \beta_3 AGE + \beta_4 BUDCAP + \beta_5 PAD + \beta_6 SIZE + \beta_7 TYPE + \beta_8 UNEMPLOY + \beta_9 WEALTH + \varepsilon$$

Model 2b

$$DISC_NONFIN = \beta_0 + \beta_1 INTACC + \beta_2 POLCOM + \beta_3 OP + \beta_4 AGE + \beta_5 BUDCAP + \beta_6 PAD + \beta_7 SIZE + \beta_8 TYPE + \beta_9 UNEMPLOY + \beta_{10} WEALTH + \varepsilon$$

DISC_FIN : Tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan pada *website* resmi Pemda

DISC_NONFIN : Tingkat pengungkapan sukarela informasi non-keuangan pada *website* resmi Pemda

INTACC : Tingkat akses terhadap internet

| | |
|------------------------|---|
| POLCOM | : Kompetisi politik |
| OP | : Opini Audit BPK |
| AGE | : Usia berdirinya Pemda |
| BUDCAP | : Kemampuan keuangan pemda (<i>Budget Capacity</i>) |
| PAD | : Tingkat Kemandirian Daerah (Pendapatan Asli Daerah) |
| TYPE | : Jenis Pemda |
| SIZE | : Total Populasi |
| UNEMPLOY | : Tingkat Pengangguran |
| WEALTH | : Tingkat Kesejahteraan masyarakat |
| $\beta_0 - \beta_{10}$ | : Koefisien |
| ε | : koefisien error |

3.3. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel merupakan bentuk penilaian terhadap masing-masing variabel penelitian. Dalam pemilihan operasionalisasi variabel diperhatikan indikator yang tepat untuk mengukur variabel penelitian sehingga diperoleh hasil yang akurat. Operasionalisasi variabel-variabel penelitian ini adalah:

3.3.1. Tingkat pengungkapan sukarela pada *website*

Data penelitian diperoleh dengan cara melakukan observasi terhadap *website* resmi Pemda dengan menggunakan indeks (checklist) tingkat pengungkapan pada *website*. Indeks tingkat pengungkapan informasi keuangan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil penggabungan dan pengembangan dari jurnal utama yaitu Garcia and Garcia (2010) dan Martani et al. (2013) serta disesuaikan dengan peraturan terbaru mengenai pengungkapan informasi keuangan diantaranya Instruksi Mendagri No 188.52/1797/SJ tentang *peningkatan transparansi keuangan daerah dengan menyediakan konten transparansi keuangan daerah pada website resmi Pemda*. Indeks pengungkapan informasi keuangan memasukkan informasi Highlight informasi keuangan, APBD, LKPD, LAKIP, Pemda dalam Angka, dan Dokumentasi anggaran.

Indeks pengungkapan informasi non keuangan didasarkan kepada penelitian Garcia-Sanchez et. al (2013), serta Penelitian sebelumnya di Indonesia

oleh Martani et al. (2013) yang berdsarkan kepada PP No 38 tahun 2007 tentang *Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Pengungkapan informasi keuangan berfokus kepada informasi 26 pelayanan wajib yang dilakukan Pemda sebagaimana yang disebutkan dalam Bab 2 tulisan ini. Indeks pengungkapan yang telah dikembangkan pada penelitian-penelitian sebelumnya diperbaiki dan dikembangkan sesuai dengan keadaan Indonesia dan berdasarkan saran-saran peneliti-peneliti tersebut.

Selanjutnya, masing-masing website Pemda dibuka dan dilihat informasi yang diungkapkan didalamnya. Kemudian ketersediaan informasi yang ada pada website dicocokkan dengan indeks yang sudah dibuat sebelumnya dengan menggunakan menuliskan 1 jika informasi diungkapkan, dan 0 jika informasi tidak diungkapkan dalam website.

3.3.2. Tingkat Akses internet

Proksi yang digunakan dalam mengukur tingkat akses terhadap internet adalah tingkat penetrasi internet di masing-masing daerah. Tingkat penetrasi internet menunjukkan jumlah penduduk yang mengakses internet pada masing-masing daerah. Informasi mengenai aksesibilitas internet ini diperoleh dari hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). APJII merupakan asosiasi yang dibentuk penyelenggaraan program pengembangan internet di Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Salah satu bentuk program yang dijalankan diantaranya penentuan tarif internet dan tarif jasa telekomunikasi, dsb.

Informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil survei APJII bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013. Survei yang dilakukan APJII adalah pada beberapa kabupaten dan kota di provinsi yang bersangkutan kemudian dilakukan metode statistik untuk menggambarkan nilai penetrasi tingkat provinsi, sehingga hasil survei final yang tersedia adalah tingkat penetrasi internet per provinsi. Untuk keperluan penelitian ini, penulis menggunakan tingkat penetrasi yang sama untuk setiap kabupaten dan kota pada provinsi yang sama.

Sekaran dan Bougie (2009) menjelaskan bahwa peneliti seharusnya dapat menyimpulkan hasil bagi populasi dengan melihat hasil dari sampel. Hal ini tentunya didasari pada proses pengambilan sampel serta hasil analisis yang mendalam oleh para ahli. BPS yang merupakan badan yang sering melakukan survey dan sensus, tentunya telah memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga menurut opini penulis data penetrasi internet provinsi dapat menggambarkan keadaan penetrasi internet untuk masing-masing kabupaten dan kota pada provinsi yang sama.

3.3.3. Kompetisi politik

Proksi yang digunakan untuk menghitung nilai kompetisi politik dengan menggunakan nilai 1-persentase kemenangan dalam pemilihan kepala daerah terakhir pada Pemda yang bersangkutan. Persentase kemenangan yang tinggi menunjukkan bahwa calon terpilih telah memenuhi preferensi masyarakat lebih besar daripada calon-calon lainnya. Hal ini berarti pasangan calon terpilih tersebut tidak mengalami kompetisi yang lebih tinggi, meskipun terdapat beberapa lawan calon lain. Sebaliknya apabila persentase kemenangan yang diperoleh tidak berbeda jauh dengan lawan lainnya, maka kompetisi antara calon terpilih dengan yang tidak terpilih lebih besar karena preferensi masyarakat terhadap masing-masing calon tidak terlalu berbeda. Hal ini akan menyebabkan kompetisi politik menjadi lebih tinggi, terutama untuk memperebutkan posisi kepala daerah pada Pilkada berikutnya.

$$\text{Kompetisi Politik} = 1 - \% \text{Kemenangan Pilkada}$$

3.3.4. Opini audit

Opini audit diperoleh dari hasil opini yang diterbitkan oleh BPK atas laporan keuangan Pemda tahun 2013. Opini audit diukur menggunakan skala ordinal, yang berarti nilai yang memiliki peringkat berbeda satu sama lainnya. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan peringkat yang lebih tinggi. Opini audit ini diberi nilai sebagai berikut: 1. Untuk opini tidak memberikan pendapat (TMP), 2. Untuk opini Tidak Wajar (TW), 3. Untuk opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 4.

Untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP), dan
5. Untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3.3.5. Usia pemda

Usia Pemda diperoleh dengan cara menghitung tahun lamanya pemda berdiri hingga tahun penelitian yaitu 2015. Tahun berdiri Pemda yang dijadikan acuan adalah berdasarkan pada tahun disahkannya dasar hukum pembentukan suatu kabupaten atau kota sebagai daerah otonom yang berada dalam lingkup Republik Indonesia.

3.3.6. Kemampuan keuangan daerah

Kemampuan keuangan daerah diukur dengan nilai kapasitas anggaran yang tersedia setelah dikurangkan dengan belanja wajib (belanja pegawai) perkapita. Belanja pegawai dikelurakan dari total belanja karena penggunaannya yang sudah terikat. Penulis merujuk kepada penelitian sebelumnya yaitu Garcia-Sanchez et al. (2013) dan Martani et al. (2013) yang menggunakan indikator yang sama dalam mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah. Nilai yang besar menunjukkan penggunaan dana yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem informasi menjadi lebih besar. Informasi terkait variabel ini diperoleh dari LKPD tahun 2013 yang telah diaudit oleh BPK

$$\text{Kemampuan keuangan daerah} = \frac{\text{Total belanja} - \text{Belanja Pegawai}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

3.3.7. Tingkat Kemandirian Daerah

Proksi yang digunakan dalam menghitung tingkat kemandirian daerah adalah adalah persentase antara jumlah PAD dengan jumlah pendapatan daerah. Informasi mengenai jumlah PAD diperoleh dari LKPD tahun 2013 yang telah diaudit oleh BPK. Nilai yang tinggi menunjukkan tingkat kemandirian yang lebih tinggi karena daerah mampu memperoleh pendapatan sendiri yang bukan berasal dari transfer pemerintah pusat.

$$\text{Tingkat Kemandirian Pemda} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

3.3.8. Jenis daerah

Variabel jenis daerah telah banyak digunakan dalam penelitian mengenai pengungkapan oleh sektor publik, salah satunya oleh Laswad et al. (2005) yang mendapatkan hasil signifikan mengenai hubungan jenis daerah dengan tingkat pengungkapan informasi keuangan pada website Pemda. Proksi jenis daerah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel dummy dimana 1 diberikan jika Pemda berbentuk Pemerintah Kota dan 0 untuk Pemda berbentuk Pemerintah Kabupaten.

3.3.9. Ukuran Pemda

Ukuran Pemda diukur dengan menggunakan proksi total populasi daerah dengan penelitian Garcia-Garcia (2010) dan Garcia-Sanchez (2013). Informasi mengenai jumlah penduduk Pemda diperoleh dari database jumlah penduduk pada Worldbank.

3.3.10. Tingkat pengangguran

Tingkat pengangguran merupakan salah satu proksi yang menunjukkan lingkungan ekonomi suatu daerah. Data mengenai tingkat pengangguran setiap Kabupaten dan Kota di Indonesia diperoleh dari pusat data Worldbank-The Indonesian Database for Policy and Economic Research (INDO-DAPOER) yang diakses melalui databank.worldbank.org. Tingkat Pengangguran dihitung dengan membagi jumlah penduduk yang menganggur dengan jumlah penduduk pada angkatan kerja.

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Menganggur}}{\text{Jumlah Penduduk dalam Angkatan Kerja}}$$

3.3.11. Kesejahteraan penduduk

Tingkat kesejahteraan penduduk dapat dilihat dari pendapatan perkapita masing-masing daerah. Informasi mengenai PDRB Perkapita masing-masing daerah diperoleh dari pusat data Worldbank-The Indonesian Database for Policy and Economic Research (INDO-DAPOER) yang diakses melalui

databank.worldbank.org. Tingkat kesejahteraan penduduk dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kesejahteraan Daerah} = \frac{\text{Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Tabel 3.1 Ringkasan Operasionalisasi Variabel

| No | Variabel | Operasionalisasi Variabel |
|----|-------------------------------------|---|
| 1 | Pengungkapan Informasi Keuangan | Indeks Pengungkapan informasi keuangan |
| 2 | Pengungkapan Informasi Non Keuangan | Indeks Pengungkapan informasi non keuangan |
| 3 | Tingkat Akses Internet | Tingkat penetrasi internet provinsi |
| 4 | Kompetisi Politik | $1 - \%kemenangan \text{ Pilkada}$ |
| 5 | Opini Audit | 5 = Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 4 = Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) 3 = Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 2 = Tidak Wajar (TW) 1 = Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) |
| 6 | Usia Pemda | $2015 - \text{tahun berdiri Pemda}$ |
| 7 | Kemampuan Keuangan Daerah | $\text{Ln} \frac{\text{Total Belanja} - \text{Belanja Pegawai}}{\text{Jumlah Penduduk daerah}}$ |
| 8 | Kemandirian Daerah | $\text{Ln} \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$ |
| 9 | Jenis Daerah | 1 = Pemda Kota, 0 = Pemda Kabupaten |
| 10 | Ukuran Daerah | Jumlah Penduduk Daerah |
| 11 | Tingkat Pengangguran | $\frac{\text{Jumlah Penduduk Menganggur}}{\text{Jumlah Penduduk dalam angkatan kerja}}$ |
| 12 | Tingkat Kesejahteraan Daerah | Ln PDRB |

3.4. Sampel Penelitian

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik sama (Indriantoro dan Supomo, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah semua Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah Pemda yang memiliki data yang lengkap, mencakup website resmi yang dapat diakses, ketersediaan LKPD tahun 2013 yang telah diaudit BPK, informasi demografi daerah, serta ketersediaan data hasil Pemilikada pada masing-masing daerah.

Namun ketersediaan data, terutama data mengenai tingkat kemenangan kepala daerah dalam Pilkada sangat terbatas sehingga penelitian dilakukan dengan memisahkan variabel kompetisi politik. Hal ini dilakukan karena perbedaan jumlah sampel yang cukup besar, sehingga dikhawatirkan akan menghasilkan hasil penelitian yang tidak akurat. Pemisahan variabel ini menjadikan hasil regresi untuk masing-masing model menjadi dua, yaitu hasil regresi tanpa variabel kompetisi politik, serta hasil regresi dengan variabel kompetisi politik. Kedua hasil regresi ini menggunakan jumlah sampel yang berbeda sehingga nantinya dapat dilihat perbedaan hasil analisis, serta sensitivitas variabel kompetisi politik terhadap variabel lainnya.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Data mengenai tingkat pengungkapan pada website diperoleh dari hasil observasi penulis terhadap masing-masing website pemda. Data terkait informasi keuangan Pemda diperoleh dari LKPD tahun 2013 yang telah diaudit yang dikeluarkan oleh BPK RI. Data demografi daerah diperoleh dari pusat data Worldbank-The Indonesia Database for Policy and Economic Research (INDO-DAPOER) yang diakses melalui databank.worldbank.org. Data mengenai tingkat kemenangan kepala daerah dalam Pilkada diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara itu data mengenai tingkat akses internet di Indonesia diperoleh dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

3.6. Teknik Analisis Data

3.6.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan teknik analisis data dengan cara mengorganisasikan, meringkas, dan menyajikan data menjadi bentuk yang lebih informatif (Lind, Marchal, and Wathen, 2010). Deskriptif data ini menunjukkan keseragaman data-data yang digunakan dalam penelitian. Analisis statistik deskriptif meliputi tiga metode, yaitu *frequency*, *central tendency*, dan *dispersion* (Sekaran, 2009). Dalam penelitian ini metode yang digunakan hanyalah *frequency* dan *central tendency*.

Central tendency diukur dengan tiga indikator yaitu rata-rata (mean), nilai tengah (median), dan nilai yang sering muncul (modus). Sementara itu, dispersion menunjukkan tingkat variabilitas data penelitian. Indikator yang dapat digunakan adalah *range* (jarak nilai terbesar ke nilai terkecil), *varians* (tingkat persebaran data), dan standar deviasi (indeks persebaran distribusi variabilitas data).

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat apakah data yang digunakan pada penelitian sudah memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan untuk menghasilkan penelitian yang akurat. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah:

1. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan kondisi dimana variabel independen memiliki hubungan yang kuat antar sesama variabel independen. Hubungan yang kuat antar variabel independen akan mengakibatkan koefisien yang dihasilkan dalam analisis regresi tidak dapat diandalkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menilai multikolinearitas adalah dengan melihat nilai *correlation covariance*. Nilai korelasi yang berada diatas *rule of thumb* 0,8 menunjukkan model regresi memiliki masalah multikolinearitas (Gujarati, 2004). Masalah multikolinearitas akan mengakibatkan model memiliki kovarian dan varian yang besar sehingga sulit dipakai sebagai alat estimasi. Selain itu dapat mempengaruhi nilai statistic uji t yang dapat mempengaruhi signifikansi suatu variabel.

2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah kondisi dimana variasi pada variabel dependen tidak konstan yang akan mengganggu hasil regresi. Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis regresi yang mengharuskan variasi pada data konstan. Uji ini diperlukan untuk memastikan bahwa data penelitian bebas dari masalah heteroskedastisitas

3.6.3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk melihat apakah hipotesis yang dirumuskan sebelumnya sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Uji hipotesis yang dilakukan adalah:

1. Uji Signifikansi Global (F-test)

Uji signifikansi global ditujukan untuk melihat kemampuan variabel independen secara bersama-sama dalam menjelaskan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan probabilitas model dengan α . Nilai probabilitas yang lebih kecil dari α menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam penelitian. Nilai R^2 berkisar dari 0 hingga 1, dengan nilai mendekati 1 menunjukkan kemampuan yang lebih besar dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai R^2 yang besar menunjukkan bahwa model penelitian yang digunakan lebih baik karena nilai pada variabel dependen dapat dijelaskan dengan lebih baik oleh variabel-variabel independen.

3. Uji Signifikansi Variabel (t-test)

Uji t-test dilakukan untuk melihat seberapa besar masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi α 1%, 5%, dan 10%. Variabel yang signifikan ditunjukkan dengan nilai p-value yang kurang dari tingkat signifikansi.

BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Ringkasan Sampel Penelitian

Pemilihan sampel pada penelitian ini didasarkan kepada tersedianya website resmi Pemerintah Daerah yang dapat diakses pada waktu penelitian yaitu Maret-April 2015. Website resmi yang diteliti adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota, sehingga website Pemerintah Provinsi tidak dimasukkan kedalam sampel penelitian. Selain itu ketersediaan data keuangan, statistik, dan demografi daerah juga menentukan pemilihan sampel dalam penelitian ini. Pemerintah Daerah yang tidak memiliki data yang lengkap akan dikecualikan dalam penelitian ini.

Berdasarkan karakteristik pemilihan sampel yang telah dijelaskan pada Bab 3, maka sampel yang digunakan adalah sebanyak 374 Pemda, dari populasi sebesar 510 Pemerintah Daerah Tingkat II. Ringkasan pemilihan sampel disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut

Tabel 4.1 Ringkasan Pemilihan Sampel

| No | Deskripsi | Jumlah Sampel |
|--|---|---------------|
| 1. | Jumlah Pemerintah Daerah di Indonesia per 31 Desember 2013 | 544 |
| 2. | Jumlah Pemerintah Daerah tingkat Provinsi | (34) |
| 3. | Jumlah Daerah Administratif DKI Jakarta | (6) |
| 4. | Jumlah Pemda yang tidak memiliki website | (28) |
| 5. | Jumlah website Pemda yang tidak bisa diakses | (53) |
| 6. | Jumlah Pemda yang tidak memiliki data lengkap | (49) |
| JUMLAH SAMPEL PENELITIAN TANPA KOMPETISI POLITIK | | 374 |
| 7. | Jumlah Pemda yang tidak memiliki data persentase kemenangan Pilkada | (118) |
| JUMLAH SAMPEL PENELITIAN DENGAN KOMPETISI POLITIK | | 256 |

Dari pemilihan sampel di atas diketahui bahwa terdapat 49 Pemda yang tidak memiliki data yang lengkap, terutama LKPD tahun 2013. Sebagian diantaranya adalah daerah otonom baru yang berasal dari pemekaran Kabupaten/Kota pada tahun 2013, sehingga daerah ini belum memiliki LKPD yang menjadi salah satu data penelitian. Pemda lain yang dikurangi dari sampel adalah 6 Kabupaten dan Kota administratif yang berada di DKI Jakarta. Daerah ini dikeluarkan dari sampel karena karakteristiknya yang bukan daerah otonom. Dalam UU No 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI disebutkan bahwa Kota administrasi/Kabupaten administrasi adalah wilayah kerja walikota/bupati yang terdiri atas kecamatan dan kelurahan. Lebih lanjut pada pasal 20 disebutkan bahwa perangkat Kota/Kabupaten administrasi hanya terdiri dari sekretariat Kota/Kabupaten administrasi, suku dinas, lembaga teknis lain, serta kecamatan dan kelurahan. Daerah administratif tidak memiliki DPRD karena sifatnya yang bukan daerah otonom. Selain itu walikota dan bupati pada daerah administratif diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. Oleh karena itu kabupaten dan kota administrasi tidak mempunyai wewenang untuk mengurus urusan daerahnya sendiri.

4.2. Statistik Deskriptif

Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 menyajikan rangkuman nilai deksripsi statistik atas sampel penelitian. Tabel 4.2 menunjukkan ringkasan deskripsi statistik tanpa menggunakan variabel kompetisi politik, yaitu dengan jumlah sampel sebanyak 374 Pemda. Sementara itu tabel 4.3 menyajikan ringkasan deskripsi statistik yang memasukkan variabel kompetisi politik yang memiliki jumlah sampel sebanyak 256 Pemda.

Tabel 4.2 Ringkasan Deskripsi Statistik Model 1a dan 2a

| Variabel | Mean | Minimum | Maximum | Std. Deviasi |
|--------------------|----------|---------|---------|--------------|
| N=374 | | | | |
| DISC_FIN | 0.08278 | 0.00000 | 0.49474 | 0.10665 |
| DISN_NONFIN | 0.17470 | 0.00952 | 0.52857 | 0.09854 |
| INTACC | 0.26744 | 0.157 | 0.415 | 0.05488 |
| OP | 3.39037 | 1 | 5 | 0.87718 |
| AGE | 42.34492 | 7 | 66 | 23.37837 |

| Variabel | Mean | Minimum | Maximum | Std. Deviasi |
|-----------------|----------|----------|----------|--------------|
| N=374 | | | | |
| BUDCAP | 14.12894 | 12.59816 | 17.02514 | 0.76306 |
| PAD | 0.08791 | 0.00446 | 0.77136 | 0.08012 |
| TYPE | 0.20588 | 0 | 1 | 0.40489 |
| SIZE | 527156.9 | 38833 | 5073116 | 593164 |
| UNEMPLOY | 0.05413 | 0.00153 | 0.19209 | 0.03178 |
| WEALTH | 15.70818 | 14.06 | 18.67 | 0.60264 |

Tabel 4.3 Ringkasan Deskripsi Statistik 1b dan 2b

| Variabel | Mean | Minimum | Maximum | Std. Deviasi |
|--------------------|----------|----------|----------|--------------|
| N=256 | | | | |
| DISC_FIN | 0.09548 | 0 | 0.49474 | 0.11145 |
| DISN_NONFIN | 0.18296 | 0.01905 | 0.52857 | 0.10036 |
| INTACC | 0.26799 | 0.157 | 0.415 | 0.05628 |
| POLCOM | 0.51274 | 0.0544 | 0.7168 | 0.11878 |
| OP | 3.48438 | 1 | 5 | 0.90735 |
| AGE | 41.36719 | 7 | 66 | 23.81197 |
| BUDCAP | 14.09030 | 12.59816 | 17.02514 | 0.74705 |
| PAD | 0.09503 | 0.01314 | 0.77136 | 0.09005 |
| TYPE | 0.20703 | 0 | 1 | 0.40597 |
| SIZE | 557481.8 | 38833 | 5073116 | 635549.1 |
| UNEMPLOY | 0.05295 | 0.00153 | 0.19209 | 0.03081 |
| WEALTH | 15.71063 | 14.06 | 18.35 | 0.61260 |

Penelitian dilakukan dengan metode observasi terhadap website resmi Pemda dengan membandingkan informasi yang disampaikan dalam website dengan indeks ceklist yang penulis susun sebelumnya. Dari 504 Pemda yang memiliki kekuasaan otonom di Indonesia, hanya 423 website yang bisa diakses. 28 Pemda tidak mempunyai website resmi, sementara 53 website Pemda tidak dapat diakses pada waktu observasi pada 18 Maret-22 April 2015. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian Martani et al. (2013) yang dapat mengakses 429 website Pemda dari total 491 Pemda yang ada pada waktu penelitian.

Pemda yang tidak memiliki website umumnya didominasi oleh kabupaten dan kota yang berada dibagian timur Indonesia, seperti yang berada pada provinsi Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. Sementara itu

website yang tidak dapat diakses umumnya dikarenakan *account suspended*, yang berarti akses untuk website tersebut dihentikan untuk sementara waktu disebabkan beberapa hal seperti pembayaran layanan yang belum lunas atau account website yang terlalu membebani server. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa masih banyak Pemda yang melaksanakan pengadaan website hanya untuk mematuhi Inpres No 3 tahun 2003, namun pemeliharaan website masih terbatas. *Account suspended* pada hasil observasi penulis umumnya dikarenakan Pemda yang bersangkutan lupa membayar biaya berlangganan atas alamat website. Aplikasi pelaksanaan Inpres No 3 tahun 2003 masih terbatas pada ketersediaan, sementara pengembangan dan pemeliharaan masih menjadi hal yang belum terlalu diperhatikan pemda sehingga hal ini menjadi satu hambatan untuk pengembangan e-government di Indonesia yang rata-rata masih berada pada tahap pertama.

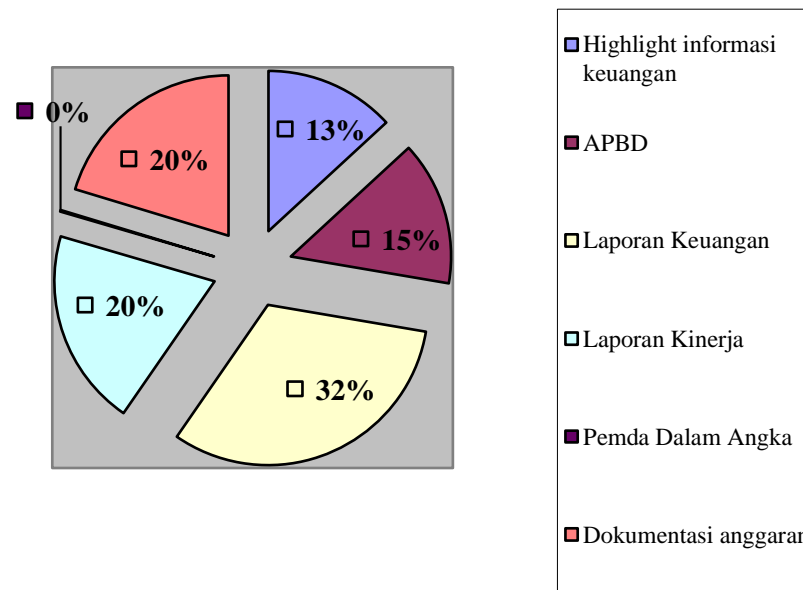
4.2.1. Tingkat Pengungkapan Informasi

4.2.1.1. Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan

Dari hasil observasi terhadap total 423 website yang bisa diakses 200 Pemda diantaranya tidak melaporkan informasi keuangan apapun dalam website resminya. Nilai ini hampir mendekati 50% dari total website yang dapat diakses. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Martani et al. (2013) yang menunjukkan hasil yang serupa. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan informasi keuangan pada website Pemda masih tergolong rendah meskipun beberapa tahun belakangan ini Pemerintah Pusat lebih gencar mengupayakan pengungkapan informasi keuangan pada website melalui beberapa peraturan pemerintah.

Gambar 4.1 menunjukkan ringkasan persentase pengungkapan informasi berdasarkan kelompok indikator informasi. Diketahui bahwa informasi keuangan yang paling banyak disampaikan adalah informasi Laporan Keuangan diikuti dengan informasi Dokumentasi Anggaran dan Laporan Kinerja. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, pengungkapan informasi keuangan lebih besar dan beragam. Penelitian Martani et al. pada tahun 2013 menemukan bahwa pengungkapan informasi keuangan umumnya hanya dalam bentuk berita keuangan, sedangkan pelaporan keuangan yang terpisah dan independen masih kecil. Dalam penelitian ini, penulis menambahkan kelompok informasi Dokumentasi Anggaran

yang berdasarkan pada Instruksi Mendagri No 188.52/1797/SJ tahun 2012 yang tidak dimasukkan dalam penelitian Martani et al. (2013). Dokumentasi Anggaran yang ditambahkan diantaranya Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) seluruh SKPD dan PPKD, Rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD, Perda tentang APBD dan perubahan APBD, Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) seluruh SKPD dan PPKD, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD dan PPKD, serta LKPD yang sudah diaudit. Tiga tahun sejak instruksi ini berlaku, dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya, pengungkapan informasi keuangan berupa laporan-laporan independen menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.



Gambar 4.1 Persentase Pengungkapan Informasi Keuangan pada Website

Pada Tabel 4.2 dan 4.3 dapat dilihat nilai pengungkapan atas website yang dijadikan sampel penelitian. Dari nilai maksimum indeks informasi keuangan yang dapat diperoleh yaitu sebesar 95 dan rata-rata pengungkapan informasi keuangan hanyalah sebesar 0.0828 atau 8,28% dari total pengungkapan seperti yang terlihat dalam Tabel 4.2 di atas. Hal ini berarti rata-rata pengungkapan informasi hanya sebesar 8 konten saja. Nilai rata-rata ini juga tidak jauh berbeda dari nilai rata-rata pengungkapan atas sampel yang memasukkan variabel kompetisi politik. Rata-rata pengungkapan yang dilakukan sebesar 9.55% seperti yang disajikan dalam Tabel 4.3.

Dilihat dari nilai maksimum pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3, pengungkapan tertinggi adalah sebesar 49,47% dari total 95 indeks yang dilakukan oleh Kota Solok. Namun hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan informasi keuangan Pemda pada website masih tergolong rendah. Pengungkapan tertinggi yang dilakukan masih kurang dari 50% indeks yang disediakan.

Dari Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa dari 374 website Pemda yang menjadi sampel penelitian model 1a dan 2a, 154 Pemda atau lebih dari 40% Pemda yang menjadi sampel tidak melaporkan informasi keuangan apapun pada website Pemda. Dari Tabel 4.4 juga diketahui bahwa sekitar 35% dari 256 Pemda pada model 1b dan 2b tidak melaporkan informasi keuangan apapun pada website. Tingkat pengungkapan informasi keuangan umumnya masih berkisar dibawah 10% dari total indeks. Sementara itu 3 tingkat pengungkapan informasi keuangan terbesar adalah Kota Solok (49,47%), Kota Tangerang (48,42%), dan Kota Banjarmasin (41.05%).

Tabel 4.4 Frekuensi Pengungkapan informasi keuangan

| No | Tingkat Presentasi | Model 1a dan | Model 3 dan 4 |
|----|--------------------|--------------|---------------|
| 1 | 0% | 154 | 91 |
| 2 | 0.1% - 10% | 101 | 70 |
| 3 | 10.01% - 20% | 62 | 48 |
| 4 | 20.01% - 30% | 37 | 31 |
| 5 | 30.01% - 40% | 17 | 13 |
| 6 | 40.01% - 50% | 3 | 3 |
| 7 | >50% | 0 | 0 |
| | N | 347 | 256 |

4.2.1.2. Tingkat Pengungkapan Informasi Non-Keuangan

Penelitian yang dilakukan terhadap tingkat pengungkapan informasi non-keuangan pada website pemda menggunakan informasi pembagian urusan wajib Pemda, yaitu pelayanan dasar yang wajib dilakukan seperti yang diamanatkan dalam PP No 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan di Indonesia. Selain informasi mengenai urusan wajib, observasi juga dilakukan terhadap ketentuan pengungkapan informasi minimum pada website Pemda yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam *Blueprint e-Government* Indonesia, yaitu mengenai informasi umum daerah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode observasi terhadap website Pemda, secara keseluruhan kelompok informasi yang paling banyak diungkapkan adalah Informasi Umum Daerah yang mencakup visi misi daerah, selayang pandang, geografi, dsb. Dari Tabel 4.5 dapat dilihat persentase pengungkapan berdasarkan kelompok informasi urusan wajib. Informasi umum daerah diungkapkan lebih dari 10% dari total informasi yang diungkapkan oleh Pemda. Selanjutnya informasi mengenai otonomi daerah dan pemerintahan umum sebesar 8,33% dan informasi mengenai perencanaan pembangunan sebesar 7,28%. Hasil ini lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok informasi kebudayaan dan pariwisata (4.62%) yang umumnya diungkapkan lebih banyak karena merupakan andalan daerah. Hal ini berkaitan dengan UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi yang diperkuat dengan PP No 61 tahun 2010 yang mengatur mengenai Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID). Kedua informasi ini termasuk kedalam Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat menyangkut rencana kerja Pemda. Hampir 5 tahun sejak peraturan terkait diterbitkan, pengungkapan informasi ini semakin meningkat secara keseluruhan, termasuk pada website Pemda yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.

Jika dilihat berdasarkan masing-masing informasi yang disajikan, informasi geografis, sejarah daerah, visi dan misi daerah, serta lambang daerah, merupakan informasi yang paling banyak diungkapkan seperti yang dirangkum dalam Tabel 4.6. Dari urusan wajib informasi yang paling banyak diungkapkan adalah objek wisata daerah serta informasi pegawai dan perangkat daerah. Sementara itu informasi yang paling sedikit diungkapkan dalam website diantaranya informasi mengenai program perlindungan anak, balai latihan bagi tenaga kerja, informasi kearsipan dan perpustakaan daerah, dan informasi mengenai pengelolaan lingkungan khususnya pengolahan limbah dan sampah.

Tabel 4.5 Persentase Pengungkapan Berdasarkan Kelompok Informasi

| No | Informasi | Persentase |
|----|------------------|------------|
| 1 | Pendidikan | 6.07% |
| 2 | Kesehatan | 4.93% |
| 3 | Lingkungan Hidup | 4.42% |
| 4 | Pekerjaan Umum | 2.91% |

| No | Informasi | Persentase |
|---------------|---|---------------|
| 5 | Penataan Ruang dan Perumahan | 0.98% |
| 6 | Perencanaan Pembangunan | 7.28% |
| 7 | Kepemudaan dan Olahraga | 2.01% |
| 8 | Penanaman Modal | 3.69% |
| 9 | Koperasi dan UKM | 2.95% |
| 10 | Kependudukan dan Catatan Sipil | 6.77% |
| 11 | Ketenagakerjaan | 2.47% |
| 12 | Ketahanan Pangan | 1.27% |
| 13 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1.67% |
| 14 | KB dan KS | 2.41% |
| 15 | Perhubungan | 5.57% |
| 16 | Komunikasi dan Informatika | 5.08% |
| 17 | Pertanahan | 0.61% |
| 18 | Kesatuan Bangsa dan Politik | 1.72% |
| 19 | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum keuangan daerah, perangkat daerah, Kepegawaian dan persediaan | 8.33% |
| 20 | Pemberdayaan Masyarakat desa | 1.90% |
| 21 | Sosial | 1.96% |
| 22 | Kebudayaan dan Pariwisata | 4.62% |
| 23 | Statistik | 2.01% |
| 24 | Kearsipan dan Perpustakaan | 1.07% |
| 25 | Aplikasi layanan berbasis Web | 6.79% |
| 26 | Umum Daerah | 10.45% |
| JUMLAH | | 100% |

Tabel 4.6 Frekuensi Pengungkapan Informasi

| No | Paling Banyak | Paling Sedikit |
|----|----------------------|-------------------------------|
| 1 | Geografis | Program Perlindungan Anak |
| 2 | Sejarah Daerah | Informasi balai latihan kerja |
| 3 | Visi dan Misi Daerah | Arsip dan perpustakaan daerah |
| 4 | Lambang Daerah | Pengelolaan air limbah |
| 6 | Perangkat Daerah | Pengelolaan Sampah |
| 7 | Objek Wisata | Pengurusan sertifikat tanah |

Tabel 4.7 Frekuensi Pengungkapan Informasi Nonkeuangan

| No | Tingkat Presentasi | Model 1a dan 2b | Model 1b dan 2b |
|----|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | 0.1% - 10% | 87 | 50 |
| 3 | 10.01% - 20% | 166 | 120 |
| 4 | 20.01% - 30% | 79 | 52 |
| 5 | 30.01% - 40% | 30 | 23 |
| 6 | 40.01% - 50% | 10 | 9 |
| 7 | >50% | 2 | 2 |
| | N | 347 | 256 |

Pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 di atas dapat dilihat deskripsi statistik Pemda yang dijadikan sampel penelitian. Dapat dilihat bahwa rata-rata pengungkapan informasi non keuangan pada website adalah 17,47% atau sebesar 37 informasi dari total nilai 210 informasi non keuangan pada indeks. Pada model 1b dan 2b juga diperoleh hasil yang tidak jauh berbeda yaitu sebesar 18,30% atau 38 informasi dari total indeks. Pada tabel 4.7 juga dapat dilihat bahwa tingkat pengungkapan informasi keuangan masih terkonsentrasi antara 10% hingga 20%. Dari sampel penelitian, nilai maksimum pengungkapan adalah sebesar 52,86% oleh Pemda Kabupaten Bantul dan nilai terkecil adalah 0,95% oleh Kabupaten Mimika.

Dibandingkan dengan informasi keuangan, pengungkapan informasi non-keuangan pada website tergolong lebih tinggi. Pasalnya informasi non-keuangan menunjukkan tingkat transparansi pelaksanaan pemerintahan, namun informasi keuangan selain transparansi juga mencakup masalah akuntabilitas. Pemda yang mengungkapkan informasi keuangan berarti secara tidak langsung sudah memastikan bahwa informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, informasi non-keuangan juga umumnya mengedepankan informasi potensi daerah sehingga pengungkapan informasi ini sekaligus menjadi alat promosi daerah kepada publik.

Tabel 4.8 Pemda dengan Skor Indeks Tertinggi

| No | Keuangan | | | Non Keuangan | | |
|----|------------|--------|-------------|--------------|------|-------------|
| | Pemda | Prov | Skor Indeks | Pemda | Prov | Skor Indeks |
| 1 | Kota Solok | Sumbar | 49,47% | Kab. Bantul | DIY | 52,86% |

| No | Keuangan | | | Non Keuangan | | |
|----|------------------|--------|-------------|------------------|--------|-------------|
| | Pemda | Prov | Skor Indeks | Pemda | Prov | Skor Indeks |
| 2 | Kota Tangerang | Banten | 48,42% | Kab. Sleman | DIY | 50,48% |
| 3 | Kota Banjarmasin | Kalsel | 41,05% | Kota Denpasar | Bali | 49,52% |
| 4 | Kota Palembang | Sumsel | 40,00% | Kota Pasuruan | Jatim | 46,67% |
| 5 | Kab. Jembrana | Bali | 40,00% | Kab. Bogor | Jabar | 45,71% |
| 6 | Kab. Kep Anambas | Kepri | 38,95% | Kab. Mojokerto | Jatim | 45,24% |
| 7 | Kab. Sleman | DIY | 38,95% | Kota Surabaya | Jatim | 44,76% |
| 8 | Kab. Banyuwangi | Jatim | 38,95% | Kab Luwu Timur | Sulsel | 42,86% |
| 9 | Kota Surabaya | Jatim | 38,95% | Kab Banyuwangi | Jatim | 41,91% |
| 10 | Kota Banda Aceh | NAD | 37,90% | Kab. Indramayu | Jabar | 41,43% |
| 11 | Kab. Purworejo | Jateng | 37,90% | Kab. Tanah Bumbu | Kalsel | 41,43% |

Tabel 4.9 Pemda dengan Skor Indeks Terendah

| No | Non Keuangan | | |
|----|-------------------------|--------------------|-------------|
| | Pemda | Provinsi | Skor Indeks |
| 1 | Kab Morowali | Sulawesi Tengah | 0,95% |
| 2 | Kab Halmahera Tengah | Maluku Utara | 0,95% |
| 3 | Kab Mimika | Papua | 0,95% |
| 4 | Kota Subulussalam | NAD | 1,43% |
| 5 | Kab Konawe | Sulawesi Tenggara | 1,43% |
| 6 | Kab Seluma | Bengkulu | 1,91% |
| 7 | Kab Hulu Sungai Selatan | Kalimantan Selatan | 1,91% |
| 8 | Kab Pohuwatu | Gorontalo | 1,91% |
| 9 | Kab Konawe Selatan | Sulawesi Tenggara | 2,38% |
| 10 | Konawe Utara | Sulawesi Tenggara | 2,38% |
| 11 | Kota Jayapura | Papua | 2,38% |

Berdasarkan hasil penelitian, Pemda yang memiliki tingkat pengungkapan yang tinggi masih didominasi oleh Pemda yang berada di pulau Jawa. Sementara tingkat pengungkapan yang rendah umumnya adalah Pemda yang berada di Indonesia bagian timur. Seperti yang terlihat pada Tabel 4.8 Pemda yang memiliki

nilai skor yang tinggi didominasi dari pulau Jawa baik informasi keuangan maupun non-keuangan. Sementara itu skor terendah non-keuangan pada Tabel 4.9 semuanya berasal dari luar pulau Jawa terutama Indonesia bagian timur. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya Martani et al. (2013) dimana pengungkapan informasi lebih banyak dilakukan pada daerah di pulau Jawa. Hal ini mungkin disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan sistem informasi dan kondisi masyarakat dan lingkungan daerah yang belum menunjang pengungkapan informasi, yang beberapa diantaranya akan tergambarkan oleh variabel independen dalam penelitian ini.

4.2.2. Tingkat Akses Internet

Tingkat akses internet yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk yang mengakses internet disetiap daerah. Keterbatasan data yang penulis peroleh maka penulis menggunakan tingkat akses internet per provinsi, sehingga tingkat akses internet setiap kabupaten dan kota yang berada pada provinsi yang sama menggunakan nilai yang sama.

Dari tabel 4.2 dan tabel 4.3 disajikan nilai statistik tingkat akses internet daerah. Rata-rata tingkat akses internet kabupaten dan kota di Indonesia adalah sebesar 26.74% dari total penduduk suatu kabupaten atau kota. Hal ini berarti bahwa lebih dari seperempat penduduk di daerah telah mengakses internet dalam. Nilai ini terbilang cukup tinggi mengingat perkembangan internet yang pesat di Indonesia baru terjadi sekitar 7 tahun belakangan.

Tingkat akses internet tertinggi adalah sebesar 41,5% yaitu daerah provinsi DI Yogyakarta dan terendah adalah 15.7% yaitu di provinsi Papua. Jika dilihat secara keseluruhan, tingkat akses internet di daerah Indonesia bagian barat lebih tinggi daripada Indonesia bagian timur. Hal ini mungkin dipengaruhi juga oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat daerah sehingga terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara masyarakat daerah Indonesia barat dan timur.

4.2.3. Tingkat Kompetisi Politik

Tingkat kompetisi politik diukur dengan proksi 1-persentase kemenangan pilkada. Variabel ini hanya digunakan pada model 1b dan 2b karena hanya

perbedaan jumlah sampel yang cukup signifikan. Pada Tabel 4.3 disajikan data-data statistik mengenai kompetisi politik. Diketahui bahwa rata-rata kompetisi politik yang dialami kepala daerah adalah 51,27% yang berarti persentase kemenangan rata-rata adalah 48,73%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pelaksanaan Pilkada di Indonesia dilakukan dengan satu putaran. Berdasarkan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah apabila tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara di atas 50% maka pasangan yang memperoleh suara di atas 30% yang terbesar merupakan pasangan terpilih. Namun jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara diatas 30%, maka akan dilaksanakan Pilkada putaran kedua dengan 2 pasangan calon yang memiliki suara terbanyak. Dari rata-rata kemenangan hanya 48.73% berarti umumnya pilkada dilaksanakan hanya satu putaran.

Nilai kompetisi politik terbesar adalah 71,68% atau persentase kemenangan sebesar 28,32% yaitu Pilkada Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan di UU dimana pasangan terpilih tidak mencapai suara 30%. Dalam pilkada ini pasangan calon yang memiliki suara tertinggi yaitu di atas 30% terlibat kasus kecurangan dan pelanggaran lainnya dalam pilkada sehingga adanya tuntutan dari pasangan calon lain dan tuntutan tersebut dikabulkan oleh MK. Nilai kompetisi politik terkecil adalah sebesar 5,44 % atau kemenangan sebesar 94,56% yaitu Pemda Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini berarti pasangan terpilih menang telak dari lawan politiknya dan tekanan kompetisi politik yang dialaminya lebih kecil.

4.2.4. Opini Audit BPK

Dilihat dari tabel 4.2 dan 4.3 opini audit Pemda di Indonesia masih terbilang rendah. Rata-rata nilai opini adalah 3,39 atau pada opini WDP untuk LKPD tahun 2013. Pada tabel 4.11 dapat dilihat bahwa perolehan opini WTP masih sedikit dibandingkan dengan WDP. Namun hal ini sudah merupakan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Winanti (2014) yang melakukan penelitian terkait opini audit menemukan bahwa opini tahun 2010 dan 2011 dari 300 kabupaten kota yang menjadi sampel penelitian lebih rendah dengan rata-rata opini adalah 2,8033 atau pada Tidak Wajar. Ditemukan juga bahwa frekuensi pemda yang memperoleh opini

WTP dan WTP-DPP jika digabungkan adalah lebih kecil dibandingkan opini terendah TMP. Tiga tahun sejak LKPD yang diteliti, akuntabilitas pada LKPD meningkat yang diwujudkan dengan opini yang lebih tinggi. Dari tabel 4.11 juga diketahui bahwa opini yang tinggi seperti WTP dan WTP-DPP masih terkonsentrasi pada Indonesia wilayah barat khususnya pulau Jawa dan Sumatera.

Tabel 4.10 Frekuensi Opini

| Skor | Opini | Jumlah | Persentase |
|---------------|---|------------|-------------|
| 5 | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | 56 | 14,97% |
| 4 | Wajar Tanpa Pengecualian-Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) | 66 | 17,65% |
| 3 | Wajar Dengan Pengecualian (WDP) | 231 | 61,77% |
| 2 | Tidak Wajar (TW) | 10 | 2,67% |
| 1 | Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) | 11 | 2,94% |
| JUMLAH | | 374 | 100% |

Tabel 4.11 Frekuensi Opini berdasarkan wilayah

| Pulau | WTP | WTP-DPP | WDP | TW | TMP |
|------------------------|-----|---------|-----|----|-----|
| Sumatera | 24 | 18 | 72 | 1 | 4 |
| Jawa | 11 | 25 | 63 | 1 | 2 |
| Nusa Tenggara dan Bali | 3 | 0 | 19 | 2 | 1 |
| Kalimantan | 3 | 14 | 26 | 2 | 0 |
| Sulawesi | 11 | 9 | 33 | 2 | 2 |
| Maluku, Maluku utara | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| Papua | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 |

4.2.5. Karakteristik Pemda

Karakteristik Pemda yang dimaksud dalam penelitian ini adalah variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian yang menjadi ciri-ciri melekat pada masing-masing Pemda. Karakteristik Pemda mencakup usia pemda, kemampuan keuangan daerah, tingkat kemandirian, ukuran Pemda, jenis pemda.

4.2.5.1. Usia Pemda

Usia pemda menunjukkan berapa lama suatu pemerintahan telah dilakukan di daerah yang bersangkutan. Pada penelitian ini umur daerah diukur berdasarkan umurnya sejak ditetapkannya suatu daerah sebagai pemerintah daerah yang memiliki kekuasaan otonomi berdasarkan undang-undang. Penetapan suatu daerah sebagai daerah otonom di Indonesia pertama kali dimulai tahun 1950 sejak disetujuinya Indonesia sebagai suatu kesatuan dengan nama NKRI.

Dari Tabel 4.2 dan 4.3 diketahui rentang usia Pemda cukup besar antara 7 tahun hingga 66 tahun. Rentang nilai yang cukup luas ini disebabkan adanya beberapa kali pemekaran daerah Indonesia. Pemekaran daerah ini semakin banyak sejak disahkannya UU No 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Pemekaran daerah paling banyak dilakukan pada awal reformasi yaitu pada tahun 1999-2004 dimana banyak tuntutan daerah yang ingin mandiri memiliki otonomi sendiri. Hingga tahun 2013 pemekaran daerah di Indonesia masih dilakukan. Usia tertua Pemda di Indonesia adalah 66 tahun seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.2. sebagian besar Pemda di Indonesia berusia 66 tahun dan umumnya merupakan daerah yang dulunya bagian dari negara-negara kecil dibawah Belanda. Sementara itu pemda yang paling muda dari sampel penelitian adalah 7 tahun yaitu Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau yang didirikan tahun 2009.

4.2.5.2. Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah diproyeksikan dengan kapasitas anggaran yang dimiliki daerah. Nilai kapasitas anggaran yang digunakan adalah kapasitas anggaran perkapita yang diperoleh dari total belanja dikurangi belanja wajib kemudian dibagi jumlah penduduk. Nilai yang digunakan dalam perhitungan adalah nilai kapasitas anggaran setelah dijadikan kedalam bentuk logaritma natural sehingga nilai tidak terlalu besar.

Pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa rata-rata kapasitas anggaran daerah adalah sebesar 14.12894 atau sebesar Rp. 1.368.109,00 per penduduk, tidak jauh berbeda dengan rata-rata sampel untuk model 1b dan 2b pada Tabel 4.3 sebesar 14.0903 atau Rp 1.316.254. Sementara itu kapasitas anggaran tertinggi adalah

Kabupaten Malinau yang berada di Provinsi baru Kalimantan Utara sebesar 17.02514 atau sekitar Rp. 24.769.957 per penduduk. Kapasitas anggaran terendah adalah Kabupaten Bangli di Provinsi Bali dengan 12,59816 atau sekitar Rp. 296.013 per penduduk. Dilihat dari nilainya terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kapasitas anggaran tertinggi dan terendah. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kemampuan daerah untuk menggunakan anggarannya dalam pembangunan infrastruktur daerah ataupun belanja lainnya yang bukan bersifat wajib, khususnya pengembangan inovasi. Dari LKPD tahun 2013 diketahui bahwa belanja Kabupaten Malinau banyak dialokasikan kepada pembangunan infrastruktur jalan, irigasi dan jaringan daerah. Dibandingkan dengan Kabupaten Bangli yang memiliki belanja pegawai lebih dari 90% dari total belanjanya, maka tentunya pembangunan infrastruktur di kabupaten Malinau lebih mudah dilakukan.

4.2.5.3. Tingkat Kemandirian Pemda

Tingkat kemandirian Pemda diukur dengan persentase pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 menjelaskan deskripsi statistik PAD. Rata-rata tingkat PAD daerah adalah 8,79% dari total pendapatan daerah. Nilai tersebut juga tidak berbeda jauh dengan nilai rata-rata model 1b dan 2b sebesar 9,503% dari total PAD. Jika dilihat pada LKPD tahun 2013 pembiayaan pelaksanaan pemerintahan daerah masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, khususnya dana alokasi umum (DAU). Nilai rata-rata DAU sampel penelitian adalah sebesar 58,94%, dimana lebih dari setengah belanja pemerintah daerah dibiayai dari DAU. Nilai rata-rata DAU yang besar ini juga menunjukkan bahwa kemandirian daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahannya masih rendah.

Dari Tabel 4.2 dan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa PAD tertinggi adalah sebesar 77,136% dari total pendapatan daerah oleh Pemda Kabupaten Badung di Provinsi Bali. Setelah ditelaah lebih lanjut ke LKPD tahun 2013 yang telah diaudit, diketahui bahwa hampir 90% nilai PAD Kabupaten Badung berasal dari pendapatan pajak daerah yang realisasinya melebihi anggaran. Tingkat kemandirian terendah adalah sebesar 0.446% pada model 1a dan 2a dan 1,314% pada model 1b dan 2b. Kedua Pemda yang memiliki tingkat PAD yang rendah ini adalah Kabupaten

Yalimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang yang dua-duanya berada di Provinsi Papua.

4.2.5.4. Jenis Daerah

Jenis daerah Pemda tingkat II di Indonesia dibedakan menjadi Pemda Kota dan Pemda Kabupaten. Dalam penelitian ini jenis daerah merupakan variabel dummy dimana Pemda Kabupaten bernilai 0 dan Pemda Kota bernilai 1. Dari 374 Pemda yang diteliti 297 diantaranya adalah Pemda Kabupaten dan hanya 77 Pemda Kota. Dari hasil tersebut diketahui bahwa Pemda di Indonesia masih didominasi dalam bentuk Kabupaten, yang mana memiliki karakteristik yang pertumbuhan dan perkembangan daerahnya dibawah Pemda dalam bentuk kota. Hal ini berarti masih banyak daerah di Indonesia yang masih bisa dikembangkan dan digali potensinya untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.2.5.5. Ukuran Pemda

Proksi yang digunakan dalam mengukur ukuran pemda adalah total populasi daerah. Pemda yang memiliki jumlah penduduk yang besar akan memiliki tuntutan pengungkapan informasi yang lebih banyak. Pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 dapat dilihat nilai rata-rata ukuran pemda adalah sebesar 527.157 orang penduduk untuk model 1a dan 2a dan 557.482 untuk model 1b dan 2b. Daerah yang memiliki jumlah penduduk paling tinggi adalah 5.073.116 orang penduduk yaitu Kabupaten Bogor sedangkan daerah yang memiliki penduduk terkecil adalah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 38.833 orang penduduk. Pada Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa daerah yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi masih terpusat pada provinsi Jawa Barat.

Tabel 4.12 Pemda dengan jumlah penduduk terbesar

| No | Kabupaten/Kota | Provinsi | Jumlah Penduduk |
|----|----------------|------------|-----------------|
| 1 | Kab Bogor | Jawa Barat | 5.073.116 |
| 2 | Kab Bandung | Jawa Barat | 3.339.684 |
| 3 | Kab Tangerang | Banten | 3.055.681 |
| 4 | Kab Bekasi | Jawa Barat | 2.884.300 |
| 5 | Kota Surabaya | Jawa Timur | 2.805.718 |
| 6 | Kab Malang | Jawa Timur | 2.490.878 |
| 7 | Kab Garut | Jawa Barat | 2.477.114 |
| 8 | Kab Sukabumi | Jawa Barat | 2.393.191 |
| 9 | Kab Cianjur | Jawa Barat | 2.213.889 |
| 10 | Kab Karawang | Jawa Barat | 2.199.394 |

4.2.6. Karakteristik Demografi

Karakteristik demografi daerah merupakan variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian yang melekat kepada keadaan penduduk daerah pemda tersebut. Variabel demografi yang digunakan dalam penelitian adalah tingkat kesejahteraan masyarakat daerah dan tingkat pengangguran.

4.2.6.1. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Daerah

Tingkat kesejahteraan masyarakat daerah digambarkan dengan nilai PDRB perkapita. PDRB menunjukkan tingkat pendapatan perkapita masyarakat perdaerah. Dalam penelitian ini nilai PDRB perkapita yang ada dijadikan dalam bentuk logaritma natural dengan tujuan untuk memudahkan dalam analisis data. Dari tabel 4.2 dan 4.3 diketahui bahwa rata-rata PDRB di Indonesia adalah 15.71 nilai yang sama dengan antara kedua kelompok model. Nilai ini menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan pertahun masyarakat daerah adalah sebesar Rp6.649.153.

Nilai PDRB tertinggi adalah sebesar 18,67 atau Rp 128.315.162 per kapita yaitu Kota Bontang dan 18,35 atau sebesar Rp 93.175.932 per kapita yaitu Kota Kediri. Tingkat kesejahteraan yang tinggi dilatarbelakangi potensi daerah ini yaitu pertambangan dan industri. Sementara itu PDRB terendah adalah sebesar 14,06

atau hanya sebesar Rp 1.276.969 yaitu Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua. Dilihat dari hasil ini terdapat perbedaan yang sangat signifikan tingkat kesejahteraan antara daerah-daerah di Indonesia, khususnya daerah timur Indonesia, yang tentunya akan mempengaruhi preferensi pembangunan dan belanja di daerah tersebut.

4.2.6.2. Tingkat Pengangguran Daerah

Tingkat pengangguran daerah merupakan indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ekonomi suatu daerah. Pengangguran yang tinggi menunjukkan bahwa banyak sumber daya manusia yang tidak digunakan untuk menghasilkan produk yang memberikan nilai tambah. Pada tabel 4.2 dan tabel 4.3 disajikan nilai statistik pengangguran di Indonesia. Rata-rata pengangguran daerah di Indonesia adalah sebesar 5,41% dari jumlah masyarakat yang berada pada angkatan kerja. Tingkat pengangguran tertinggi adalah sebesar 19,209% yaitu Kota Sibolga provinsi Sumatera Utara dan tingkat pengangguran terendah adalah 0,153% yaitu Kabupaten Nias yang juga berada pada Provinsi Sumatera Utara.

4.3. Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.12 dan 4.13 menunjukkan korelasi antara variabel independen dengan dependen serta korelasi variabel independen dengan variabel independen lainnya. Dapat dilihat bahwa variabel BUDCAP berkorelasi negatif terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan, sedangkan variabel lainnya berkorelasi positif. Dari tabel 4.12 diketahui bahwa WEALTH memiliki korelasi paling besar (24,43%) dan variabel UNEMPLOY memiliki korelasi paling kecil (12,24%) terhadap pengungkapan informasi keuangan. Sementara variabel SIZE memiliki korelasi paling besar (35,58%) dan UNEMPLOY memiliki korelasi paling kecil (1,93%) terhadap pengungkapan informasi non-keuangan. Sementara itu pada tabel 4.13 setelah ditambahkan variabel kompetisi politik, diperoleh bahwa WEALTH memiliki korelasi paling besar (26,95%) dan POLCOM memiliki korelasi paling kecil (4,58%) terhadap pengungkapan informasi keuangan.

Sementara itu PAD memiliki korelasi paling besar (37,33%) dan OP memiliki korelasi paling kecil (0,79%) terhadap pengungkapan informasi non-keuangan pada website.

Korelasi variabel independen sesama variabel independen juga disajikan dalam tabel. Dapat dilihat bahwa tidak ada variabel yang memiliki korelasi di atas *rule of thumb* 0,8. Hal ini berarti model bebas dari masalah multikolinearitas.

Tabel 4.12 Matriks Korelasi Variabel Model 1a dan 2a

| | DISC_FIN | DISC_N~N | INTACC | OP | AGE | BUDCAP | PAD | SIZE_Pop | TYPE | UNEMPLOY | WEALTH |
|-------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|--------|----------|--------|
| DISC_FIN | 1.0000 | | | | | | | | | | |
| DISC_NONFIN | 0.3643 | 1.0000 | | | | | | | | | |
| INTACC | 0.1376 | 0.1315 | 1.0000 | | | | | | | | |
| OP | 0.1840 | 0.0345 | 0.0507 | 1.0000 | | | | | | | |
| AGE | 0.1502 | 0.3096 | -0.0062 | -0.0999 | 1.0000 | | | | | | |
| BUDCAP | -0.1389 | -0.2989 | -0.1020 | 0.0497 | -0.5485 | 1.0000 | | | | | |
| PAD | 0.2315 | 0.3440 | 0.0866 | 0.1048 | 0.2781 | -0.2627 | 1.0000 | | | | |
| SIZE_Pop | 0.1938 | 0.3558 | -0.0486 | -0.0320 | 0.4297 | -0.6206 | 0.4934 | 1.0000 | | | |
| TYPE | 0.1801 | 0.0880 | -0.0282 | 0.1052 | -0.0477 | 0.0428 | 0.3793 | -0.0625 | 1.0000 | | |
| UNEMPLOY | 0.1224 | 0.0193 | 0.0117 | -0.0510 | 0.0597 | -0.0518 | 0.2179 | 0.2178 | 0.4207 | 1.0000 | |
| WEALTH | 0.2443 | 0.1539 | -0.0711 | 0.0887 | -0.0029 | 0.2662 | 0.3461 | 0.0106 | 0.3509 | 0.2840 | 1.0000 |

Tabel 4.13 Matriks Korelasi Variabel Model 1b dan 2b

| | DISC_FIN | DISC_N~N | INTACC | POLCOM | OP | AGE | BUDCAP | PAD | SIZE_Pop | TYPE | UNEMPLOY | WEALTH |
|-------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|--------|----------|--------|
| DISC_FIN | 1.0000 | | | | | | | | | | | |
| DISC_NONFIN | 0.3564 | 1.0000 | | | | | | | | | | |
| INTACC | 0.1974 | 0.1926 | 1.0000 | | | | | | | | | |
| POLCOM | 0.0458 | -0.0744 | -0.0371 | 1.0000 | | | | | | | | |
| OP | 0.1699 | 0.0079 | 0.0583 | -0.1105 | 1.0000 | | | | | | | |
| AGE | 0.1527 | 0.2742 | -0.0242 | -0.0515 | -0.1384 | 1.0000 | | | | | | |
| BUDCAP | -0.1035 | -0.2592 | -0.1030 | 0.0080 | 0.1193 | -0.5254 | 1.0000 | | | | | |
| PAD | 0.2026 | 0.3733 | 0.1278 | -0.1395 | 0.0768 | 0.2703 | -0.2394 | 1.0000 | | | | |
| SIZE_Pop | 0.1609 | 0.3545 | -0.0547 | -0.0291 | -0.0640 | 0.4382 | -0.5851 | 0.5062 | 1.0000 | | | |
| TYPE | 0.1991 | 0.1603 | -0.0518 | 0.0609 | 0.0993 | -0.0416 | 0.0086 | 0.3775 | -0.0452 | 1.0000 | | |
| UNEMPLOY | 0.1340 | 0.0760 | -0.0040 | 0.0756 | -0.0788 | 0.0808 | -0.0394 | 0.2008 | 0.2311 | 0.3868 | 1.0000 | |
| WEALTH | 0.2695 | 0.2473 | -0.0189 | -0.0357 | 0.0770 | 0.0497 | 0.2643 | 0.3736 | 0.0525 | 0.3469 | 0.2361 | 1.0000 |

4.3.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas juga dilakukan terhadap data penelitian untuk melihat konsistensi varian data yang digunakan. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan metode *Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test for heteroskedas-*

ticity yang terdapat dalam Stata 12. Suatu model akan mengalami masalah heteroskedastisitas apabila nilai probabilitasnya lebih kecil dari $\alpha=1\%$. Dari hasil uji diketahui bahwa semua model mengalami masalah heteroskedastisitas. Maka diperlukan suatu perlakuan agar masalah heteroskedastisitas tidak mempengaruhi hasil regresi nantinya. Penulis memperlakukan metode *robust* terhadap hasil regresi sehingga varian data penelitian sudah konstan dan hasil regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

4.4. Hasil Regresi

Tabel 4.14 dan Tabel 4.15 menunjukkan hasil regresi terhadap 4 model penelitian. Hasil regresi model 1a dan 2a yang tidak menggunakan variabel kompetisi politik disajikan dalam tabel 4.14. Sementara model 1b dan 2b yang memasukkan variabel kompetisi politik dan menggunakan sampel yang lebih sedikit disajikan dalam tabel 4.15. Sebelumnya dari hasil uji heteroskedastisitas ditemukan bahwa keempat model penelitian memiliki masalah heteroskedastisitas. Penulis menggunakan perlakuan metode *robust* untuk menghilangkan masalah ini. Hasil regresi yang disajikan dalam tabel 4.14 dan 4.15 merupakan hasil penelitian yang telah diberikan perlakuan *robust* sehingga hasil ini telah sesuai dengan asumsi penelitian.

Tabel 4.14 Hasil Regresi Model 1a dan 2a

| Variabel Independen | Model 1a | | | | Model 2a | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|----------------------------|-----------|----------|----------|
| | Var Dependen = DISC_FIN | | | | Var Dependen = DISC_NONFIN | | | |
| | Hyp | Exp. Sign | Koef | Prob | Hyp | Exp. sign | Koef | Prob |
| Cons | | | -.615886 | 0.004 | | | -.196832 | 0.261 |
| INTACC | H1 | + | .302932 | 0.003*** | H2 | + | .255142 | 0.004*** |
| OP | H5 | + | .019642 | 0.003*** | H6 | + | .001488 | 0.789 |
| AGE | H7 | + | .000373 | 0.184 | H8 | + | .000635 | 0.005*** |
| BUDCAP | H9 | + | -.009087 | 0.381 | H10 | + | -.011335 | 0.194 |
| PAD | H11 | + | -.059536 | 0.511 | H12 | + | .113938 | 0.374 |
| TYPE | H13 | + | .034392 | 0.079* | H14 | + | .021006 | 0.201 |
| SIZE | H15 | + | 2.96e-08 | 0.028** | H16 | + | 3.89e-08 | 0.008*** |

| Variabel Independen | Model 1a Var Dependen = DISC_FIN | | | | Model 2a Var Dependen = DISC_NONFIN | | | |
|--|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|---|-----------|----------|-----------|
| | Hyp | Exp. Sign | Koef | Prob | Hyp | Exp. sign | Koef | Prob |
| UNEMPLOY | H17 | +/- | -.090698 | 0.663 | H18 | +/- | -.463287 | 0.004**** |
| WEALTH | H19 | + | .041449 | 0.000**** | H20 | + | .026847 | 0.006**** |
| R^2 | | | 0.1715 | | R^2 | | | 0.2373 |
| $Prob F$ | | | 0.0000 | | $Prob F$ | | | 0.0000 |
| n -observation | | | 374 | | n -observation | | | 374 |
| *** = signifikansi 99% ($\alpha=1\%$), * = signifikansi 90% ($\alpha=10\%$) | | | | | ** = signifikansi 95% ($\alpha=5\%$), | | | |

Tabel 4.15 Hasil Regresi Model 1b dan 2b

| Variabel Independen | Model 1b Var Dependen = DISC_FIN | | | | Model 2b Var Dependen = DISC_NONFIN | | | |
|--|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|---|-----------|----------|-----------|
| | Hyp | Exp. Sign | Koef | Prob | Hyp | Exp. sign | Koef | Prob |
| Cons | | | -.779737 | 0.004 | | | -.339518 | 0.096 |
| INTACC | H1 | + | .442255 | 0.001**** | H2 | + | .370057 | 0.001**** |
| POLCOM | H3 | + | .064959 | 0.217 | H4 | + | -.033802 | 0.434 |
| OP | H5 | + | .020703 | 0.010** | H6 | + | -.001132 | 0.861 |
| AGE | H7 | + | .000555 | 0.135 | H8 | + | .000478 | 0.075* |
| BUDCAP | H9 | + | -.005236 | 0.716 | H10 | + | -.008786 | 0.398 |
| PAD | H11 | + | -.121878 | 0.206 | H12 | + | .053416 | 0.697 |
| TYPE | H13 | + | .042956 | 0.081* | H14 | + | .035917 | 0.062* |
| SIZE | H15 | + | 2.77e-08 | 0.078* | H16 | + | 4.31e-08 | 0.007**** |
| UNEMPLOY | H17 | +/- | -.008180 | 0.976 | H18 | +/- | -.358953 | 0.056* |
| WEALTH | H19 | + | .043902 | 0.001**** | H20 | + | .033681 | 0.003**** |
| R^2 | | | 0.1990 | | R^2 | | | 0.2714 |
| $Prob F$ | | | 0.0000 | | $Prob F$ | | | 0.0000 |
| n -observation | | | 256 | | n -observation | | | 256 |
| *** = signifikansi 99% ($\alpha=1\%$), * = signifikansi 90% ($\alpha=10\%$) | | | | | ** = signifikansi 95% ($\alpha=5\%$), | | | |

Atas hasil uji regresi di atas dilakukan uji signifikansi model. Uji signifikansi model (F-test) digunakan untuk melihat apakah variabel independen dalam model secara keseluruhan bersama-sama dapat menjelaskan variabel dependen. Suatu model dikatakan signifikan apabila nilai probabilitas F lebih kecil dari $\alpha = 1\%$, 5% , atau 10% . Pada tabel 4.14 dan 4.15 disajikan nilai Prob F yang menunjukkan tingkat signifikansi model. Keempat model yang diteliti menunjukkan tingkat signifikansi 0,0000 yang berarti semua model dalam penelitian telah benar dan dapat menjelaskan variabel dependen secara akurat.

Selain nilai F-stat atas model penelitian juga dilakukan uji koefisien determinasi yang digambarkan dengan nilai R^2 . Uji koefisien determinasi R^2 digunakan untuk melihat kemampuan variasi variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi pada variabel independen. Pada model 1a diperoleh nilai R^2 sebesar 0,1715 yang berarti variabel independen dapat menjelaskan 17,15% variabel dependen. Pada model 1b ditambahkan variabel POLCOM kedalam model 1 dan jumlah sampel dikurangi sehingga diperoleh nilai R^2 sebesar 0,1990. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa penambahan satu variabel POLCOM meningkatkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 2,75%.

Padahal model 2a nilai R^2 adalah sebesar 0,2373 atau 23,71% menjelaskan variabel dependen. Pada model 2b, setelah penambahan variabel POLCOM pada model 2a, diperoleh hasil R^2 sebesar 0,2714. Penambahan variabel POLCOM menambah kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 3,42%. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa penambahan variabel POLCOM akan menambahkan kemampuan menjelaskan tingkat pengungkapan informasi non-keuangan lebih besar dibandingkan informasi keuangan. Hal ini berarti dengan adanya tambahan kompetisi politik maka kepala daerah lebih banyak melaporkan informasi non-keuangan dibandingkan dengan keuangan yang berarti dalam hal transparansi kegiatan pelayanan publik pemerintahan. Tambahan pengungkapan informasi keuangan lebih sedikit daripada non-keuangan. Hal ini mungkin disebabkan bahwa pengungkapan informasi keuangan pada website akan meningkatkan pengawasan lawan politik yang mencari kekurangan pelaksanaan pemerintahan khususnya dalam hal akuntabilitas.

4.5. Interpretasi Hasil Uji Hipotesis

4.5.1. Akses Internet

Dari hasil penelitian pada Tabel 4.14 dan Tabel 4.15 diketahui bahwa tingkat akses internet mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi keuangan secara positif dengan nilai probabilitas 0,003 dan 0,001 setelah ditambahkan variabel kompetisi politik. Sementara itu hubungan tingkat akses internet terhadap pengungkapan informasi non-keuangan secara positif dan signifikan dengan nilai probabilitas 0,004 dan 0,001 setelah ditambahkan variabel kompetisi politik. Hal ini berarti semakin tinggi akses internet di suatu daerah maka semakin besar informasi yang diungkapkan dalam website Pemda, baik informasi keuangan maupun informasi non-keuangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang memprediksi hubungan positif antara tingkat akses internet terhadap pengungkapan informasi pada website.

Perkembangan ilmu teknologi secara khusus menjadikan persebaran informasi yang lebih mudah sehingga monitoring terhadap kegiatan pemerintahan lebih mudah dilakukan. Ketersediaan akses internet menjadikan kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan menjadi lebih mudah. Tingkat akses internet yang tinggi menunjukkan bahwa bentuk pengawasan melalui internet menjadi lebih besar sehingga tekanan untuk menyajikan informasi pada website Pemda meningkat yang berujung pada pengungkapan informasi yang lebih besar pula pada website.

4.5.2. Kompetisi Politik

Uji terhadap variabel kompetisi politik dilakukan dengan menggunakan jumlah sampel yang berbeda karena keterbatasan data yang penulis peroleh. Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.15 diketahui bahwa tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara kompetisi politik terhadap pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan.

Kompetisi politik memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Laswad (2005) yang tidak ditemukan hubungan signifikan antara kompetisi politik dengan pengungkapan informasi keuangan pada website. Namun hasil penelitian

ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Garcia-Garcia (2010) yang menemukan hubungan positif signifikan antara kompetisi politik dengan pengungkapan informasi keuangan pada website. Adanya perbedaan dengan hasil penelitian Garcia-Garcia (2010) disebabkan adanya perbedaan proksi yang digunakan pada penelitian untuk mengukur tingkat kompetisi politik. Dalam penelitian ini proksi yang digunakan adalah 1-persentase kemenangan sementara Garcia-Garcia (2010) menggunakan *inverse of Herfindahl-Hirschmann index (HHI)*. Selain itu perbedaan kultur politik dan sistem pemerintahan pada masing-masing negara yang menjadi objek penelitian, yaitu Indonesia dan Spanyol, dapat mempengaruhi hasil penelitian sehingga tidak diperoleh hasil yang sesuai dengan hipotesis penelitian.

Hubungan kompetisi politik dengan pengungkapan informasi non-keuangan pada website ditemukan berbeda dengan hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan hubungan negatif namun tidak signifikan, berbeda dengan hipotesis yang memperkirakan hubungan positif. Hasil ini sejalan dengan penelitian Garcia-Sanchez (2013) yang menemukan hubungan negatif yang signifikan, berbeda dengan hipotesis yang diajukan sebelumnya. Menurut Garcia-Sanchez (2013) hal ini berarti bahwa ketika adanya kompetisi politik maka pengungkapan informasi non-keuangan bukanlah menjadi sesuatu hal yang menjadi perhatian khusus kepala daerah terpilih terhadap lawan politiknya. Jika dikaitkan dengan pengungkapan informasi keuangan, kepala daerah terpilih lebih cenderung mengungkapkan informasi keuangan yang menunjukkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahannya dibandingkan mengungkapkan informasi pelaksanaan urusan wajib pemerintahan, sehingga dapat meningkatkan simpati masyarakat atas pemerintahan yang bersih dan terbuka. Hal ini terutama dilakukan apabila kepala daerah tersebut ingin mengajukan diri kembali pada pemilihan kepala daerah selanjutnya (Barber, 1983 dalam Laswad, 2005).

4.5.3. Opini Audit

Hasil regresi hubungan opini audit terhadap pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan pada website dapat dilihat pada Tabel 4.14 dan Tabel 4.15. Dari hasil uji regresi pada diketahui nilai prob hasil regresi adalah 0.003 dan 0.010 yang berarti opini audit memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan

informasi keuangan pada website Pemda secara signifikan. Hal ini berarti semakin tinggi nilai opini audit maka semakin besar pengungkapan informasi keuangan pada website. Sementara itu tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara opini audit dengan tingkat pengungkapan informasi non-keuangan.

Pemda yang memiliki opini audit yang bagus berarti memiliki pelaporan dan pelaksanaan keuangan yang baik dan cenderung tidak akan menutup-nutupi informasi pelaksanaan yang baik ini. Pengungkapan informasi keuangan yang memiliki opini yang bagus akan menjadi sinyal positif bagi masyarakat atas pemerintahan yang dilakukan, sehingga informasi keuangan akan lebih banyak diungkapkan dalam website. Hasil ini menjawab penelitian Trisnawati dan Achmad (2014) terkait pengungkapan informasi keuangan pada website yang tidak menemukan hubungan yang signifikan.

Sementara itu hubungan yang tidak signifikan antara opini audit dengan tingkat pengungkapan informasi non-keuangan dikarenakan hubungan yang relatif kecil. Dari hasil uji korelasi pada tabel 4.12 dan 4.13 diketahui bahwa opini audit hanya memiliki hubungan sebesar 3% dan 0,7% terhadap pengungkapan informasi non-keuangan. Hal ini juga dapat dimaklumi karena opini audit merupakan proksi atas informasi keuangan pada LKPD, sehingga lebih mencerminkan informasi keuangan daripada informasi non-keuangan khususnya informasi pelayanan publik yang menjadi objek penelitian ini.

4.5.4. Usia Pemda

Usia pemda menunjukkan berapa lama Pemda tersebut telah melakukan tugas otonom menurut undang-undang Indonesia. Dari hasil regresi pada tabel 4.14 dan 4.15 dapat dilihat bahwa tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara usia Pemda dengan tingkat pengungkapan informasi keuangan pada website. Namun, model 2a dan 2b menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara usia pemda dengan tingkat pengungkapan informasi non-keuangan pada tingkat signifikansi 1% dan 10%. Hal ini berarti bahwa semakin tua usia suatu Pemda maka semakin besar tingkat pengungkapan informasi pada website. Pemda yang sudah berdiri lebih lama telah melakukan kegiatan pemerintahan yang lebih lama sehingga lebih banyak informasi-informasi terkait pengembangan daerah dan pelayanan publik

yang telah dilakukan. Semakin lama pemda berdiri maka jumlah informasi ini semakin besar pula sehingga penyampaian informasi tersebut kepada publik lebih besar, salah satu medianya adalah melalui website resmi pemda.

Hasil yang tidak signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan mungkin disebabkan karena keterbatasan indeks skoring yang digunakan. Pemda yang telah berdiri lebih lama tentunya memiliki laporan keuangan, kinerja, dan informasi keuangan lainnya lebih banyak dibandingkan dengan pemda yang baru berdiri sehingga informasi yang diungkapkan lebih banyak. Namun terdapat keterbatasan indeks skoring dalam penelitian, salah satu contoh indeks adalah “LKPD tahun 2011 dan sebelumnya” yang mana indeks ini merangkum LKPD tahun 2011 hingga tahun pendirian Pemda. Pemda yang mengungkapkan LKPD sebelum tahun 2011 lebih banyak dibandingkan dengan yang mengungkapkan hanya tahun 2011 tetap diberikan nilai 1 pada ceklis meskipun terdapat perbedaan jumlah informasi yang diungkapkan. Penggabungan informasi yang dirangkum hanya kedalam satu indeks ceklis ini mungkin tidak menggambarkan jumlah informasi yang sebenarnya sehingga diperoleh hasil yang tidak signifikan.

4.5.5. Kemampuan Keuangan Daerah

Dari hasil regresi pada Tabel 4.14 dan 4.15 di atas tidak diperoleh hasil yang signifikan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan maupun informasi non-keuangan pada website pemda. Namun nilai koefisien menunjukkan nilai negatif yang berarti semakin besar kapasitas anggaran daerah maka pengungkapan informasi semakin sedikit. Hasil penelitian berbeda dengan penelitian terkait terhadap informasi non-keuangan sebelumnya yang dilakukan oleh Martani et al. (2013) yang menemukan hubungan positif pada tingkat signifikansi 5% antara hubungan kemampuan keuangan daerah dengan tingkat informasi non-keuangan pada website. Meskipun demikian, hasil penelitian yang menunjukkan hubungan negatif sejalan dengan penelitian jurnal utama Garcia-Sanchez et al. (2013). Penelitian Garcia-Sanchez et al. menemukan hubungan negatif antara kapasitas anggaran dengan tingkat pengungkapan informasi non keuangan dengan hasil yang diperoleh tidak signifikan. Hasil penelitian Garcia-Sanchez ini juga berbeda dengan hipotesis

bahwa kapasitas anggaran akan mempengaruhi pengungkapan non-keuangan secara positif.

Penelitian hubungan kapasitas anggaran terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan belum pernah dilakukan. Hasil yang berbeda dengan hipotesis menurut penulis disebabkan resistensi Pemda untuk mengungkapkan informasi keuangan apabila kapasitas anggaran lebih besar karena kapasitas anggaran yang lebih besar dapat meningkatkan ketertarikan publik terhadap informasi sehingga dapat memicu pertanyaan yang lebih besar dari publik atas pertanggungjawaban kapasitas anggaran yang lebih besar.

Garcia-Sanchez et al. (2013) menjelaskan bahwa kapasitas anggaran yang tinggi akan meningkatkan kemampuan Pemda untuk pengembangan infrastruktur sistem informasi sehingga mendorong Pemda untuk melaporkan informasi yang lebih banyak. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi yang diungkapkan tidak lebih besar. Menurut penulis, pengembangan infrastruktur mungkin dapat lebih ditingkatkan dengan posisi pemda yang memiliki kapasitas anggaran yang lebih besar, namun hal ini belum tentu meningkatkan jumlah pengungkapan informasi sehingga diperoleh hasil yang tidak sesuai dengan hipotesis penelitian. Selain itu, dari sampel yang digunakan dalam penelitian diketahui bahwa 10 nilai kapasitas anggaran terbesar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16 Daerah dengan Kapasitas Anggaran Tertinggi

| No | Pemda | Provinsi | Ln BUDCAP perkapita | Nilai Indeks | |
|----|------------------|-------------|---------------------------|--------------|----------------|
| | | | | Kuangan | Non Kuangan |
| 1 | Kab Malinau | Kaltara | 17.02514 | 0.03158 | 0.08571 |
| 2 | Kab Kep. Anambas | Kepri | 16.76081 | 0.38947 | 0.28571 |
| 3 | Kab Natuna | Kepri | 16.44719 | 0.22105 | 0.30952 |
| 4 | Kab Kaimana | Papua barat | 16.24555 | 0.0000 | 0.08095 |
| 5 | Kab Yalimo | Papua | 16.24426 | 0.00000 | 0.03810 |
| 6 | Kab Sorong | Papua barat | 16.15415 | 0.00000 | 0.15238 |
| 7 | Kab Peg. Bintang | Papua | 16.14162 | 0.00000 | 0.17143 |

| No | Pemda | Provinsi | Ln BUDCAP perkapita | Nilai Indeks | |
|----|--------------|----------|---------------------------|--------------|----------------|
| | | | | Kuangan | Non Kuangan |
| 8 | Kab Asmat | Papua | 16.12453 | 0.00000 | 0.10000 |
| 9 | Kab Bulungan | Kaltara | 16.09682 | 0.07368 | 0.23333 |
| 10 | Kab Nunukan | Kaltara | 15.96258 | 0.12632 | 0.12857 |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata Pemda yang memiliki kapasitas anggaran yang besar adalah daerah yang tergolong daerah otonom baru dan daerah terpencil yang masih membutuhkan pembangunan yang besar dibidang infrastruktur. Dari LKPD sepuluh Pemda di atas diketahui bahwa selain belanja pegawai, jumlah belanja yang nilainya besar adalah belanja jalan, irigasi, dan jaringan. Nilai jenis belanja ini tidak jauh berbeda dengan jumlah belanja pegawai. Dari ini dapat dilihat bahwa kapasitas anggaran yang dimiliki daerah-daerah di atas umumnya masih digunakan untuk pembangunan infrastruktur pokok seperti jalan dan irigasi. Meskipun memiliki kapasitas anggaran yang besar, namun karena kondisi geografisnya yang terpencil ataupun karena potensinya yang belum tergal, daerah-daerah ini masih kekurangan infrastruktur primer yang dibutuhkan sehingga pengembangan sistem informasi seperti internet belumlah menjadi prioritas utama daerah-daerah ini. Hal inilah yang kemungkinan mengakibatkan tingkat pengungkapan informasi pada website pemda masih tergolong rendah.

Selain hal diatas, hasil penelitian yang tidak signifikan dapat disebabkan karena data yang tersebar dan tidak konsisten. Dari tabel 4.16 dapat dilihat bahwa sebagian daerah yang memiliki kapasitas anggaran besar memiliki pengungkapan yang kecil, namun beberapa diantaranya memiliki pengungkapan yang besar seperti Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna. Hal ini mungkin disebabkan jumlah penduduk masing-masing daerah yang nantinya mempengaruhi nilai kapasitas anggaran yang digunakan dalam penelitian. Perbandingan jumlah belanja dan kepadatan penduduk tidak selamanya sama untuk semua daerah di Indonesia sehingga hal ini dapat mempengaruhi hasil penelitian.

4.5.6. Kemandirian Daerah

Kemandirian daerah digambarkan dengan tingkat pendapatan asli daerah (PAD). Daerah yang memiliki PAD yang lebih tinggi lebih mandiri karena pendapatannya tidak bergantung kepada transfer dari pemerintah pusat atau provinsi. Dari hasil penelitian pada tabel 4.14 dan 4.15 diperoleh bahwa PAD memiliki hubungan negatif terhadap pengungkapan informasi keuangan pada website namun tidak signifikan, yang berarti semakin besar PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat pengungkapan informasi keuangan pada website. Hal ini berbeda dengan hipotesis yang memperkirakan bahwa tingkat PAD akan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan pada website. Hasil ini juga berbeda dari penelitian Sari (2010) yang menemukan hubungan positif antara PAD dengan tingkat pengungkapan pada website.

Sementara itu PAD mempengaruhi pengungkapan informasi non-keuangan secara positif yang sesuai dengan hipotesis, namun tidak ditemukan hasil yang signifikan. Hal ini berarti semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pengungkapan informasi non-keuangan pada website. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sari (2010) yang menemukan hubungan positif signifikan. Penambahan variabel kompetisi politik dalam model juga tidak mempengaruhi hasil penelitian pada informasi keuangan maupun informasi non-keuangan.

Adanya perbedaan hasil penelitian terhadap pengungkapan informasi keuangan menurut penulis disebabkan adanya perbedaan indeks skoring yang digunakan. Sari (2010) menggunakan indeks skoring dengan cakupan yang lebih luas yang tersebar atas presentasi dalam website dan konten informasi website. Namun, penelitian ini berfokus pada konten informasi website saja yang dibagi menjadi informasi keuangan dan non-keuangan. Indeks skoring Sari (2010) tidak memasukkan unsur informasi keuangan dan sebagian besar indeks pada bagian konten informasi website merupakan informasi non-keuangan yang masuk kedalam indeks skoring penulis, sehingga sebagian nilai indeks penelitian Puspita (2010) mendekati indeks skoring informasi non-keuangan penulis. Hal ini dapat dilihat juga pada hasil penelitian hubungan PAD dengan tingkat pengungkapan informasi non-keuangan pada website yang memiliki korelasi positif sesuai dengan penelitian Sari (2010). Sementara itu penelitian yang secara spesifik melihat pengaruh PAD

terhadap pengungkapan informasi keuangan pada website Pemda belum pernah dilakukan.

Jika dilihat dari hasil penelitian, PAD memiliki hubungan positif terhadap transparansi informasi non-keuangan namun hubungan negatif terhadap informasi keuangan. Semakin tinggi tingkat kemandirian suatu Pemda, maka Pemda tersebut memiliki preferensi untuk mengungkapkan informasi non-keuangan daripada keuangan. Pemda tersebut lebih banyak mengungkapkan informasi kegiatan dan pelayanan yang dilakukan dari pendapatan asli daerah tersebut, daripada informasi keuangan yang menunjukkan pelayanan publik yang dilakukan atas PAD yang diperoleh. Pengungkapan informasi non-keuangan dalam hal ini pelayanan publik pada website Pemda menunjukkan kinerja Pemda yang bagus sehingga akan menjadi sinyal positif bagi masyarakat, yang nantinya dapat menarik PAD baru. Selain itu pengungkapan informasi dalam bentuk informasi non-keuangan mungkin lebih mudah dipahami karena dapat dijabarkan dalam bentuk narasi sehingga menjangkau seluruh aspek masyarakat. Sementara itu informasi keuangan yang umumnya dilaporkan memiliki bentuk pelaporan yang baku dan tidak semua masyarakat dapat dengan mudah memahaminya sehingga pemda memiliki kecenderungan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk non-keuangan.

4.5.7. Jenis Daerah

Hasil penelitian yang melihat hubungan jenis daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan pada Tabel 4.14 dan 4.15 ditemukan hubungan positif yang signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa jenis Pemda Kota memiliki tingkat pengungkapan informasi keuangan yang lebih besar pada website resmi, namun tidak ditemukan pengaruh signifikan pada pengungkapan informasi non-keuangan. Penambahan variabel kompetisi politik kedalam model informasi non-keuangan menghasilkan ditemukannya hubungan yang signifikan antara jenis daerah dengan tingkat pengungkapan informasi non-keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Laswad et al. (2005) yang menemukan hubungan positif signifikan antara jenis daerah dengan tingkat pengungkapan informasi keuangan. Penelitian ini menjawab hubungan jenis daerah dengan tingkat

pengungkapan informasi pada website yang belum terbukti pada penelitian sebelumnya di Indonesia seperti Martani et al. (2013) dan Sari (2010).

Pemerintah daerah yang berbentuk Kota memiliki struktur daerah dan karakteristik penduduk yang berbeda dengan Pemda Kabupaten. Kondisi lingkungan yang lebih moderen dan kondisi ekonomi yang lebih baik meningkatkan tingkat kepedulian masyarakat akan pelaksanaan pemerintahan sehingga permintaan akan informasi pelaksanaan pemerintah sebagai bentuk pengawasan publik menjadi lebih besar dibandingkan dengan daerah kabupaten.

4.5.8. Ukuran Pemda

Ukuran pemda akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pemerintahan pada suatu daerah yang akan mempengaruhi tingkat penyampaian informasi terkait kegiatan tersebut. Proksi yang digunakan untuk mengukur ukuran pemda adalah total populasi, hasil regresi penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.14 dan 4.15.

Dari penelitian diperoleh hasil bahwa ukuran daerah berpengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan informasi non-keuangan pada website. Hasil ini juga konsisten setelah ditambahkan variabel kompetisi politik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Garcia dan Garcia (2010) dan Martani et al. (2013) yang menemukan pengaruh positif yang signifikan antara ukuran daerah dengan pengungkapan informasi keuangan pada website. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Garcia-Sanchez et al. (2013) yang menemukan hubungan positif yang signifikan antara ukuran Pemda yang diukur dengan jumlah populasi dengan tingkat pengungkapan informasi non-keuangan pada website Pemda.

Pemda yang besar yang memiliki jumlah penduduk lebih besar memiliki pengawasan publik yang lebih banyak serta *stakeholder* yang lebih beragam. Untuk memenuhi permintaan informasi para *stakeholder* ini pemda melakukan pengungkapan yang lebih besar pada website, baik informasi keuangan maupun informasi non keuangan.

4.5.9. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ekonomi di suatu daerah. Dari hasil regresi pada tabel 4.14 dan tabel 4.15 diperoleh hasil bahwa tingkat pengangguran tidak mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan pada website pemda secara signifikan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Martani et al. (2013) yang tidak menemukan hubungan signifikan antara tingkat pengangguran terhadap pengungkapan informasi keuangan di website.

Sementara itu diperoleh hasil hubungan negatif yang signifikan antara tingkat pengangguran dengan tingkat pengungkapan informasi non-keuangan pada website pemda. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pengangguran di suatu daerah maka semakin kecil pengungkapan informasi non-keuangan pada website. Hasil ini sejalan dengan penelitian Guillamo et al. (2011). Pemda yang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi berarti memiliki status ekonomi daerah yang lebih rendah, dimana umumnya permintaan informasi atas pelaksanaan pemerintahan masih kecil sehingga pengungkapan informasi ini lebih kecil.

4.5.10. Kesejahteraan Penduduk

Kesejahteraan penduduk juga merupakan salah satu indikator ekonomi daerah. Kesejahteraan penduduk diukur dengan menggunakan proksi PDRB perkapita. Hubungan tingkat kesejahteraan penduduk dengan pengungkapan informasi pada website disajikan pada Tabel 4.14 dan 4.15

Dari hasil penelitian di atas dibuktikan bahwa kesejahteraan penduduk memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan pada website. Semakin tinggi pendapatan regional perkapita suatu daerah maka semakin tinggi informasi keuangan yang disampaikan pada website. Hasil ini sejalan dengan penelitian Style and Tennyson (2007) serta Martani et al. (2013) yang melakukan penelitian serupa di Indonesia.

Hasil yang signifikan juga ditemukan pada hubungan kesejahteraan penduduk dengan pengungkapan informasi non-keuangan. Hubungan yang ditemukan adalah positif, berarti semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu daerah maka semakin tinggi pengungkapan informasi non-keuangan pada website pemda.

Secara keseluruhan kesejahteraan daerah akan meningkatkan pengungkapan informasi pada website, baik keuangan maupun non keuangan.

Daerah yang memiliki pedapatan regional yang tinggi berarti memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Masyarakat yang memiliki kesejahteraan yang lebih tinggi lebih memperhatikan pelaksanaan pemerintah daripada yang memiliki kesejahteraan yang rendah, sehingga meningkatkan tuntutan terhadap akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintah sebagai bentuk monitoring lebih tinggi.

4.6. Rangkuman Hasil uji regresi

Tabel 4.16 menunjukkan rangkuman hasil uji terhadap hipotesis penelitian. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akses internet daerah, opini audit, jenis daerah, ukuran daerah, serta tingkat kesejahteraan daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan pada website.

Akses internet daerah, usia daerah, jenis daerah, ukuran daerah, serta tingkat kesejahteraan daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi non-keuangan pada website, sementara tingkat pengangguran daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan informasi non-keuangan pada website.

Tabel 4.17 Rangkuman Uji Hipotesis

| Variabel | DISC_FIN | | | DISC_NONFIN | | |
|------------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| | Hipo tesis | Hasil Uji Model 1a | Hasil Uji Model 1b | Hipo tesis | Hasil Uji Model 2a | Hasil Uji Model 2b |
| Akses Internet Daerah | + | + *** | + *** | + | + *** | + *** |
| Kompetisi Politik | + | | + | + | | - |
| Opini Audit LKPD 2013 | + | + *** | + ** | + | + | - |
| Usia Daerah | + | + | + | + | + *** | +* |
| Kemampuan Keuangan Pemda | + | - | - | + | - | - |
| Tingkat Kemandirian | + | - | - | + | + | + |
| Jenis Daerah | + | + * | + * | + | + | + * |
| Ukuran Daerah | + | +** | +* | + | + *** | + *** |
| Tingkat Pengangguran | +/- | - | - | +/- | - *** | -* |
| Tingkat Kesejahteraan Daerah | + | +*** | + *** | + | +*** | +*** |

4.7. Uji Sensitivitas

Pada tabel dibawah ini dirangkum hasil uji sensitivitas yang penulis lakukan. Tabel 4.18 dan 4.19 dirangkum hasil uji sensitivitas bagi informasi keuangan dan tabel 4.20 dan 4.21 merupakan hasil uji sensitivitas terhadap informasi non-keuangan. Bagi model 1a dan 1b yang menggunakan pengungkapan informasi keuangan sebagai variabel dependennya, penulis menggunakan empat kelompok utama indeks pengungkapan informasi keuangan yaitu APBD, LKPD, Kinerja, serja Dokumentasi anggaran. Sementara itu bagi model 2a dan 2b, penulis menggunakan empat kelompok indeks informasi non-keuangan yang paling banyak diungkapkan pada website pemda, yaitu pendidikan, perencanaan pembangunan, pemerintahan, dan informasi umum daerah.

Tabel 4.18 Uji Sensitivitas Model 1a

| Variabel | Model 1a | | | | | |
|------------------------------|-----------|--------------------|-------|------|---------|-------------|
| | Hipotesis | Hasil Uji Model 1a | APB D | LKPD | Kinerja | Dokumentasi |
| Akses Internet Daerah | + | +*** | + | +*** | + | +* |
| Opini Audit LKPD 2013 | + | +*** | +* | +* | +** | +** |
| Usia Daerah | + | + | + | + | +* | + |
| Kemampuan Keuangan Pemda | + | - | -* | - | + | - |
| Tingkat Kemandirian | + | - | + | - | + | - |
| Jenis Daerah | + | +* | + | + | + | + |
| Ukuran Daerah | + | +** | + | +*** | + | + |
| Tingkat Pengangguran | +/- | - | - | + | - | - |
| Tingkat Kesejahteraan Daerah | + | +*** | +*** | +*** | + | +*** |

Tabel 4.19 Uji Sensitivitas Model 1b

| Variabel | Model 1b | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------|-------|------|---------|-------------|
| | Hipotesis | Hasil Uji Model 1b | APB D | LKPD | Kinerja | Dokumentasi |
| Akses Internet Daerah | + | +*** | + | +*** | +* | +** |

| Variabel | Model 1b | | | | | |
|------------------------------|-----------|--------------------|-------|------|---------|-------------|
| | Hipotesis | Hasil Uji Model 1b | APB D | LKPD | Kinerja | Dokumentasi |
| Kompetisi Politik | + | + | - | + | + | + |
| Opini Audit LKPD 2013 | + | + ** | + | +* | + | +*** |
| Usia Daerah | + | + | + | + | +* | + |
| Kemampuan Keuangan Pemda | + | - | - | - | + | - |
| Tingkat Kemandirian | + | - | - | - | - | - |
| Jenis Daerah | + | + * | + | + | +** | + |
| Ukuran Daerah | + | +* | + | +*** | +* | - |
| Tingkat Pengangguran | +/- | - | - | + | - | + |
| Tingkat Kesejahteraan Daerah | + | + *** | +*** | +*** | + | +** |

Pada tabel 4.18 dan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa dalam hal informasi keuangan khususnya informasi kinerja, *willingness* untuk menyampaikan informasi ini lebih banyak. Dapat dilihat dari hubungan kemampuan keuangan daerah dan kemandirian daerah yang positif. Berbeda dengan hasil regresi utama yang ditemukan hubungan negatif. Hal ini merupakan sinyal positif bahwa Pemda lebih bersedia untuk mengungkapkan informasi terkait kinerja. Hal ini juga mungkin disebabkan bahwa informasi kinerja dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah, sehingga pengungkapannya lebih banyak.

Tabel 4.20 Uji Sensitivitas Model 2a

| Variabel | DISC_NONFIN | | | | | |
|--------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------|--------------|------|
| | Hipotesis | Hasil Uji Model 2a | Pendidikan | Pembangunan | Pemerintahan | Umum |
| Akses Internet Daerah | + | + *** | + | + | +* | +*** |
| Opini Audit LKPD 2013 | + | + | - | +*** | + | - |
| Usia Daerah | + | + *** | +*** | +* | +** | +** |
| Kemampuan Keuangan Pemda | + | - | - | - | -* | - |
| Tingkat Kemandirian | + | + | + | - | + | + |

| | | | | | | |
|------------------------------|-----|------|-----|------|------|---|
| Jenis Daerah | + | + | - | +** | - | + |
| Ukuran Daerah | + | +*** | + | +*** | + | + |
| Tingkat Pengangguran | +/- | -*** | - | -*** | -* | - |
| Tingkat Kesejahteraan Daerah | + | +*** | +** | +*** | +*** | + |

Tabel 4.21 Uji Sensitivitas Model 2b

| Variabel | DISC_NONFIN | | | | | |
|------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|---------------------|----------------------|------|
| | Hipo tesis | Hasil Uji Model 2b | Pendi dikan | Pemb angun an | Peme rintah an | Umum |
| Akses Internet Daerah | + | +*** | + | + | +** | +*** |
| Kompetisi Politik | + | - | - | - | + | - |
| Opini Audit LKPD 2013 | + | - | - | +* | + | - |
| Usia Daerah | + | +* | +** | + | + | + |
| Kemampuan Keuangan Pemda | + | - | - | - | -** | + |
| Tingkat Kemandirian | + | + | + | -** | + | - |
| Jenis Daerah | + | +* | + | +*** | + | +** |
| Ukuran Daerah | + | +*** | + | +*** | + | +* |
| Tingkat Pengangguran | +/- | -* | - | -* | - | + |
| Tingkat Kesejahteraan Daerah | + | +*** | +*** | +*** | +*** | + |

Dari hasil uji sensitivitas pengungkapan informasi non-keuangan pada tabel 4.20 dan 4.21 ditemukan bahwa terdapat beberapa variabel yang hasilnya tidak signifikan dengan hasil uji model utama. Namun dari hasil di atas dapat dilihat bahwa hubungan opini audit dengan pengungkapan informasi non-keuangan bagian pembangunan ditemukan positif dan signifikan. Hasil ini berbeda dengan hasil uji model utama yang tidak ditemukan hubungan signifikan. Dari hasil ini dapat disimpulkan untuk informasi terkait perencanaan pembangunan daerah lebih banyak diungkapkan. Perencanaan pembangunan merupakan bentuk rencana kerja yang akan dilakukan Pemda untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut sehingga penyampaian informasi terkait rencana pembangunan dapat memberikan citra positif Pemda terhadap masyarakat.

Dari hasil uji di atas juga diketahui bahwa beberapa variabel penelitian memiliki hasil yang tidak konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya. Beberapa diantaranya adalah variabel kemampuan keuangan Pemda dan tingkat kemandirian pemda yang pada beberapa uji memberikan tanda hubungan yang berbeda. Adanya perbedaan hasil ini dapat disebabkan karena jumlah indeks yang kecil, terutama indeks non keuangan. Rata-rata indeks per kelompok informasi yang digunakan di atas hanyalah 7 sampai 10 total informasi sehingga hasil yang berbeda dapat diakibatkan data yang tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian terhadap website Pemda Kabupaten dan Kota di Indonesia, dari 504 Pemda yang mempunyai kekuasaan otonom hanya 423 website yang dapat diakses pada waktu penelitian. Sebanyak 28 pemda belum mempunyai website dan 53 website pemda tidak dapat diakses. Jumlah ini mengalami penurunan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat mengakses website lebih banyak.

Sampel yang digunakan dalam penelitian terbagi menjadi dua yaitu sebesar 374 untuk model 1a dan 2a dan 256 untuk model 1b dan 2b. Pembagian ini dikarenakan terbatasnya data atas variabel kompetisi politik sehingga model 1a dan 2a tidak dimasukkan variabel ini dan variabel 1b dan 2b dimasukkan variabel kompetisi politik namun dengan jumlah sampel yang lebih sedikit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat akses internet, opini audit, jenis daerah, ukuran daerah, serta tingkat kesejahteraan daerah memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan informasi keuangan pada website. Namun tidak ditemukan pengaruh yang signifikan antara variabel usia pemda, kemampuan keuangan daerah, kemandirian daerah, serta tingkat pengangguran dan kompetisi politik terhadap pengungkapan informasi keuangan pada website.

Tingkat akses internet, usia pemda, ukuran pemda, serta tingkat kesejahteraan daerah mempengaruhi pengungkapan informasi non-keuangan secara positif. Sedangkan tingkat pengangguran mempengaruhi informasi non-keuangan secara negatif. Namun tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara hubungan opini audit, kemampuan keuangan daerah, tingkat kemandirian daerah, jenis daerah, dan tingkat kompetisi politik terhadap tingkat pengungkapan informasi non-keuangan pada website pemda.

Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa dana yang lebih besar tidak mendorong Pemda untuk meningkatkan informasi keuangan atau akuntabilitasnya. Kapasitas anggaran dan PAD yang besar ternyata lebih mengurangi tingkat pengungkapan, yang mana seharusnya dana yang besar akan memberikan tanggung jawab yang besar bagi pemda untuk melaporkan penggunaannya kepada masyarakat. Jika dilihat dari pada hubungan kemandirian daerah dengan pengungkapan informasi non-keuangan yang positif maka dapat dilihat bahwa pemda lebih terbatas untuk pengungkapan informasi keuangannya daripada informasi non-keuangan sehingga pelaksanaan anggaran umumnya lebih diungkapkan dalam bentuk informasi kegiatan pelayanan pemerintahan (non-keuangan) daripada informasi laporan keuangan terpisah.

Kondisi demografi penduduk akan mempengaruhi tingkat pengungkapan secara positif, dimana kondisi masyarakat yang lebih baik dan sejahtera akan meningkatkan kepedulian terhadap pelaksanaan daerah sehingga tekanan untuk melaporkan informasi menjadi lebih tinggi. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang menemukan hubungan signifikan pada tingkat kesejahteraan dan tingkat pengangguran terhadap pengungkapan informasi pada website. Jenis daerah dan ukuran daerah juga mempengaruhi pengungkapan informasi karena perbedaan struktur masing-masing daerah yang umumnya berfokus pada penduduk di daerah tersebut.

Opini audit mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan pada website secara positif. Hal ini dikarenakan opini audit yang lebih tinggi menunjukkan kinerja yang lebih baik, sehingga pengungkapan informasi ini menjadi sinyal positif bagi masyarakat. Usia pemda mempengaruhi pengungkapan informasi non-keuangan karena Pemda yang sudah berdiri lebih lama melakukan pelayanan publik yang lebih banyak sehingga informasi yang disampaikan juga lebih banyak.

Tingkat akses internet mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan. Dengan semakin mudah dan murah dalam memperoleh informasi, salah satunya internet, menjadikan akses internet mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas pada website dengan signifikan. Internet menjadikan

pengawasan publik dapat dilakukan dengan lebih mudah sehingga tekanan untuk mengungkapkan informasi pelaksanaan pemerintahan menjadi lebih besar.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan utama dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penelitian yang hanya pada pengungkapan informasi website pada tahun 2015 karena keterbatasan waktu penelitian, sehingga penulis membandingkan hasil penelitian dengan beberapa penelitian yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya dalam analisis penelitian ini. Penelitian juga berdasarkan pada hasil indeks skoring, yang mana terdapat perbedaan indeks yang digunakan dengan penelitian sebelumnya sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian. Selain itu penggunaan indeks skoring dalam menilai tingkat pengungkapan informasi pada website terdapat aspek subjektivitas penulis dalam penilaian yang dapat menjadikan perbedaan dalam hasil akhir penelitian.

Keterbatasan lainnya adalah ketersediaan data yang digunakan sebagai variabel independen penelitian. Beberapa LKPD pemda tahun 2013 yang digunakan dalam penelitian tidak tersedia di BPK selain itu informasi terkait kompetisi politik yang diperoleh dari persentase kemenangan pilkada tidak tersedia di KPU. Keterbatasan data inilah yang menjadikan penulis memisahkan variabel kompetisi politik karena perbedaan jumlah data yang cukup signifikan. Selain itu variabel tingkat akses internet yang ada hanya per provinsi sehingga penulis menggunakan data yang diseragamkan untuk setiap kabupaten dan kota yang berada di provinsi yang sama. Untuk kedepannya diharapkan tersedianya data yang lebih lengkap sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih akurat.

5.3. Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan pada website pemda dengan menghubungkannya pada beberapa variabel yang akan mempengaruhi nilai pengungkapan informasi ini. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat pengungkapan informasi pada website masih terbilang rendah. Tidak adanya peraturan yang mengatur informasi-informasi yang harus disampaikan pada website menjadikan pengungkapan hanya

berdasarkan pada sukarela pemda. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa motivasi pemda untuk mengungkapkan informasi pada website masih terbilang rendah.

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah sebagai regulator bahwa pembentukan regulasi terkait pengungkapan informasi pada website diperlukan. Informasi pelaksanaan pemerintah baik informasi keuangan maupun non-keuangan merupakan hak masyarakat sebagai *stakeholder* terbesar pemerintah sehingga penyampaiannya melalui media yang mudah dan murah diakses merupakan suatu bentuk transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar.

Bagi penelitian selanjutnya penambahan variabel-variabel lain yang mempengaruhi pengungkapan informasi pada website pemda dapat dilakukan seperti *press visibility*, *leverage*, stabilitas politik, dan tingkat investasi sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Selain itu pengembangan indeks skoring yang digunakan dengan menambah jumlah indeks yang lebih menunjukkan jumlah informasi yang disampaikan pada website pemda.

DAFTAR PUSTAKA

- Afryansyah, R.D. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet Oleh Pemerintah Daerah*. Semarang: Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Alwi, Kholida. 2014. *Pengaruh Hasil Pemeriksaan BPK dan Faktor Politik terhadap Transparansi Informasi Keuangan dan Kinerja pada Website Pemerintah Daerah di Indonesia*. Depok: Skripsi Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 2012. *Profil Pengguna Internet Indonesia 2012*. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Badan Pusat Statistik Indonesia. 2013. *Penggunaan Internet Sektor Bisnis 2013*. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2007. *Daftar Nama Provinsi/Kabupaten/Kota Menurut Dasar Hukum Pembentukan Wilayah*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Evans III, J. H. & Patton, J. M. 1987. *Signaling and Monitoring in Public-Sector Accounting*. *Journal of Accounting Research* Vol. 25, 130-158.
- Gandia, J.L. & Archidona, M.C. 2007. *Determinants of Website Information by Spanish City Council*. *Online Information Review*, Vol. 32, No. 1. 35-57.
- Garcia-Sanchez, et al. 2013. *Determinants of Corporate Social Disclosure in Spanish Local Government*. *Journal of Cleaner Production* 39, 60-72.
- Garcia & Garcia-Garcia. 2010. *Determinants of Online Reporting of Accounting Information by Spanish Local Government Authorities*. *Local Government Studies*, Vol. 36, No. 5, 679-695.
- Hilmi, A.Z. & Martani. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi*. Depok: Skripsi Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

- Jensen, M., & Meckling, W. 1976. *Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics* 3, 305-360.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 7 A Tahun 2007 Tentang Tatacara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2012. *Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.52/1797/SJ Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2014. *Daerah Otonom (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) Di Indonesia per 31 Desember 2013*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. 2003. *Cetak Biru (Blueprint) Sistem Aplikasi e-Government bagi Lembaga Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. 2003. *Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika d Kabupaten/ Kota*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Khasanah, N.L. & Rahardjo, S. N. 2014. *Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan*

- Pemerintah Daerah. Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 3, No. 3, Hal 1-11.*
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2011. *Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum RI.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2013. *Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Angka Tahun 2011 & 2012*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum RI.
- Laswad, et al. 2005. *Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. Journal of Accounting and Public Policy 24*. 101-121.
- Liestiani, A. (2008). *Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia untuk tahun anggaran 2006*. Depok: Skripsi Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Lindbolm, C.K. 1994. *The Implications of Organizational Legitimacy for Corporate Social Performance and Disclosure*. New York: *Critical Perspectives on Accounting Conference*.
- Mahadeo, et al. 2011. *Changes in Social and Environmental Reporting Practices in an Emerging Economy (2004-2007): Exploring the Relevance of Stakeholder and Legitimacy Theories. Accounting Forum 35*. 158-175.
- Martani, et al. 2013. *Disclosure of Non-Financial Information about Public Service on the Official Website of Local Governments in Indonesia*.
- Martani, et al. 2014. *Financial and Performance Transparency on The Local Government Websites in Indonesia. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Vol. 60, No. 3*.
- Perez, C.C. et al. 2005. *Citizens' Access to On-line Governmental Financial Information: Practices in European Union Countries. Government Information Quarterly 22*, 258-276.
- Republik Indonesia. 2001. *Instruksi Presiden Republik Indonesia No 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2003. *Instruksi Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2008 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Presiden Republik Indonesia No 35 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Sari, Rora Puspita. 2010. *Pengaruh Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Pemerintah Daerah di Indonesia pada Situs Pemerintah Daerah Tahun 2010*. Depok: Skripsi Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Sekaran, Uma & Bougie, R. 2009. *Research Method for Business: A Skill-Building Approach 6th edition*. USA: John-Wiley & Sons.
- Setyaningrum, D. & Syafitri, F. 2012. *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Desember 2012, Vol. 9, No. 2, Hal 154-170.
- Suchman, M. C. 1995. *Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approachs*. *Academy of Management Journal* , Vol. 20, No. 3, 571-610.
- Tregidga, H. et al. 2007. *Organisational Legitimacy and Social and Environmental Reporting Research: The Potential of Disclosure Analysis*. *New Zealand*

Business and Sustainability: Critically Analysing Discourse and Practice.
Grant Number 02-UOO-120.

- Trisnawati, M. D. & Achmad, K. 2014. *Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet.* Universitas Brawijaya.
- Wicaksono, P. T. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Opini dan Temuan Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008-2009.* Depok: Skripsi Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Winanti, B.A. 2014. *Analisis Pengaruh Temuan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK, Legitimasi Kepala Daerah serta Pengawasan Pemerintahan Terhadap Opini Audit LKPD 2010-2011.* Depok: Skripsi Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Yavuz, N. & Welch, E.W. 2014. *Factors Affecting Openness of Local Government Websites: Examining The Differences Across Planning, Finance and Police Departments.* *Government Information Quarterly* 31, 574-583.